

Asam Manisnya Pendidikan dan Latihan Profesi Guru

Pengalaman, Pemikiran dan Laku Diri Menuju
Status Sebagai Profesor

Momon Sudarma

Saya Wakafkan Tulisan ini untuk Pembangunan Pesantren

Ajakan

JIKA WACANA INI, TERASA ADA MANFAATNYA, KAMI MENGAJAK UNTUK MEMANFAATKAN **PELUANG WAKAF TUNAI** BAGI PEMBANGUNAN **PONDOK PESANTREN MANBAUL HUDA KOTA BANDUNG**.

Wakaf Tunai disampaikan ke :

a/n MA Manbaul Huda No. Rekening :

0407-01-001532-50-1,

Rek, Bank BRI KC Bandung Soekarno Hatta

Kisah yang tertuturkan dalam buku ini, tidak murni terjadi sendiri. Ada beberapa kisah yang terjadi oleh orang lain, tepatnya sesama peserta diklat PLPG waktu itu. Karena, dalam penginapan itu, ada empat kamar, dan penghuninya sebanyak 15 orang, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, madrasah yang berbeda, daerah asal berbeda serta mata pelajaran yang disertifikasi berbeda, seringkali memancing kami untuk bersenda gurau secara ramai di asrama ini, atau dilokasi diklat.

Beberapa diantaranya, malah tulisan itu, dimuat ulang di sini, dari tulisan yang pernah di muat di media massa atau pada blog pribadi. Hal itu dilakukan, dalam rangka menegaskan pemikiran diri mengenai program sertifikasi itu sendiri. Sehingga, tulisan ini, tidak sekedar diartikan sebagai cerita naratif atau cerpen mengenai PLPG, tetapi dapat ditelaah beberapa manfaat mengenai pemikiran pribadi tentang sertifikasi profesi itu sendiri.

Besar harapan, kepada semua pihak yang pernah terlibat dalam kegiatan PLPG, lebih khususnya kepada mereka yang sempat tersentuh cerita ini, baik dinyatakan langsung maupun sekedar disentuh inisialnya saja, dapat menggugah memori kita mengenai kegiatan PLPG di maksud. Sedangkan, bagi pihak lain, atau pengambil kebijakan, dapat dijadikannya sebagai informasi

tambahan dari lapangan, dari mereka yang menjalani proses sertifikasi itu sendiri. Sehingga pada ujungnya, dapat ditarik hikmah mengenai model dan atau mekanisme sertifikasi yang jauh lebih berwibawa lagi.

Sementara kepada para profesor (sebutan untuk mereka yang sudah menjadi guru profesional), semoga pengalaman ini dapat dijadikan sebagai bahan renungan, dalam menjalani profesi sebagai guru.

Salam Kenangan, Salam Perjuangan

Momon Sudarma

Bukan ikut-ikutan. Tetapi ini adalah satu konsekuensi yang harus diterima. Oleh siapapun. Setuju atau tidak setuju. Setiap para pelaku kegiatan, akan disebut dengan jenis pekerjaannya. Seseorang yang bercocok tanam, akan disebut petani. Orang yang menjajakan barang, akan disebut sebagai pedagang. Orang yang mengajar akan disebut pengajar. Orang yang menjalankan tugas sebagai aktivis partai, akan disebut politisi.

Sehubungan hal ini, kita pun, khususnya kalangan guru, disaat menjalankan tugas mengajar, maka dia akan disebut pengajar. Saat melaksanakan tugas mendidik, akan disebutnya sebagai pendidik. Bila menjalankan tugas membimbing siswa, maka dia akan disebut sebagai pembimbing.

Persoalan lanjutannya, guru saat ini, ternyata memiliki jabatan baru. Jabatan itu disebutnya sebagai guru profesional, atau guru dianggap sebagai profesi. Seorang pendukung disebut supporter, ahli museum disebut kurator, orang yang menjalankan tugas sebagai artis atau seni tata laku disebut aktor, maka penyandang tugas profesi, dapat disebut pula sebagai *profesor*.

Inilah sebutan yang akan digunakan dalam wacana ini. Oleh karena itu, terlebih dahulu, saya mohon maaf, kepada para penyandang gelar profesor akademik yang sudah lebih dulu ada. Penggunaan istilah profesor

ini, tidak dimaksudkan untuk menyaingi status akademik beliau. Sebutan profesor ini, sekedar sebagai sebuah konsekuensi logis dari jabatan yang kini disandang oleh para guru yang sudah lulus sertifikasi profesi. Mereka itulah, profesor-profesor baru di lingkungan pendidikan dasar dan menengah.

Sertifikasi Itu

Selepas diberlakukannya UU Sisdiknas Nomor 30 Tahun 2003 dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tenaga pendidik di Indonesia diberi angin-segar yang menjanjikan. Satu sisi ada amanat undang-undang tentang pentingnya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD, dan pada sisi lain ada harapan untuk mendapatkan penambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok bila telah mengantongi sertifikat profesi. Pada tahun 2009 ini, secara ekonomi kedua kebijakan ini sudah mulai dirasakan. Guru, siswa dan merasakan sudah mulai merasakan dampak dari kebijakan kenaikan anggaran pendidikan dan sertifikasi profesi.

Dalam pandangan Udin Syaefudin Saud (2009:92-93) kebijakan sertifikasi profesi atau pemberian tunjangan profesi merupakan bentuk nyata pengakuan pemerintah kepada profesi guru dan tenaga kependidikan. Bahkan, dapat dikatakan bahwa kebijakan ini pun merupakan pengakuan pengakuan tidak langsung dari masyarakat kepada profesi pendidikan. Kendati memang, pengakuan atau penghargaan terhadap eksistensi profesi guru dan tenaga pendidikan, tidak selamanya harus berbentuk financial. Namun pemberian tunjangan profesi adalah bagian penting yang tidak

dipisahkan dari pengakuan pemerintah dan masyarakat terhadap profesi keguruan.

Berdasarkan Undang-undang Guru dan Dosen, Nomor 14 Tahun 2005, pada bagian Hak dan Kewajiban, pasal 14, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak : Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan social; mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan; memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; memiliki kebebasan untuk beresikat dalam organisasi profesi; memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan/atau ; memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Diantara penghargaan, yang memiliki reaksi sosiologis paling luas, tampak hanya terlihat dari aspek ekonomi. Kebijakan adanya tunjangan profesi bagi guru yang telah menjalani uji sertifikasi, menjadi fenomena social yang meluas di lingkungan guru dan dosen. Hal ini, bukan saja karena ada implikasi peningkatan pendapatan, tetapi —diharapkan—berdampak

pula terhadap peningkatan kinerja guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai petugas profesi.

Kendati demikian, khusus untuk dunia pendidikan, atau efek terhadap peningkatan mutu pendidikan, masih diragukan. Berbagai analisis masih memberikan penilaian yang kurang memuaskan. Bagi kelompok kritis ini, kebijakan sertifikasi profesi (a) lebih menjawab tuntutan undang-undang guru dan dosen, daripada menjawab masalah pendidikan, (b) peningkatan tunjangan tidak serta merta mendorong peningkatan kualitas profesionalitas guru dalam mengajar, dan atau (c) tidak tampak adanya perbedaan nyata antara sebelum dan sesudah pelaksanaan uji sertifikasi. Tiga argument ini, kemudian mendorong adanya sikap kritis terhadap *qua vadis* sertifikasi profesi tenaga pendidikan.

Respon Guru

Dalam mencermati apa yang terjadi di lapangan ada sebagian pihak yang meragukan korelasi uji sertifikasi dengan peningkatan kualitas atau mutu pendidikan. Benarkah dengan adanya sertifikasi guru, mutu dan kualitas layanan pendidikan akan meningkat ?

“Hal yang harus diingat, uji sertifikasi itu untuk meraih tunjangan profesi bukan untuk meningkatkan profesionalisme”, kata Usep dari sebuah madrasah yang ada di Kota Bandung. Logika ini menarik untuk dicermati. Hal ini pun mengindikasikan bahwa sinyalemen mengenai adanya kegairahan guru dalam mempersiapkan diri mengikuti sertifikasi itu tidak dilandasi oleh keinginannya untuk meningkatkan kompetensi

profesionalismenya, namun lebih didorong oleh hasrat ekonomi merupakan sesuatu hal yang nyata.

Berdasarkan indikasi tersebut, tidak mustahil bila kemudian tujuan ideal pelaksanaan sertifikasi guru pada dunia pendidikan akan sulit diwujudkan. Uji sertifikasi tidak akan mampu mendongkrak kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik. Hemat kata, belum tampak ada satu jaminan mengenai adanya korelasi positif antara sertifikasi profesi dengan peningkatan profesionalisme.

“bagaimana mungkin akan meningkat profesionalisme, bila portopolio yang dikumpulkan pun adalah hasil manipulasi”, cetus seorang guru di lapangan. Seorang pengamat pendidikan yang pernah menjadi konsultan pendidikan di Provinsi Jawa Barat, A.J.W. Mahri, malah mengatakan. “saya tidak percaya pada sertifikasi dengan model portopolio sekarang ini !”. Kenyataan mengenai adanya manipulasi sertifikat (portopolio) ini diungkapkan pula oleh Cewan (bukan nama asli) yang bertugas sebagai seorang anggota assessor portopolio sertifikasi guru di Jawa Barat.

Uje (2009), seorang mahasiswa pascasarjana Pendidikan di UPI, memberikan penegasan bahwa tunjangan profesi bukanlah diorientasikan untuk peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan itu hanya dalam rangka menjawab tuntutan undang-undang, dan bukan tuntutan kebutuhan pendidikan. Karena motif dan dorongan seperti ini pula, maka acuan yang lebih banyak dijaikan patokan oleh pemerintah adalah ketercapaiannya tuntutan peraturan perundangan, dan bukan efektivitas peningkatan pelayanan pendidikan.

Kenyataan ini semakin menguatkan keraguan sebagian kalangan terhadap efektivitas penyelenggaraan uji sertifikasi berbasis portopolio. Penilaian berbasis portopolio ini sudah memiliki bias-bias ketidakakuratan mengenai apa yang dinilai sesuai dengan apa yang diinginkan.

Terkait dengan keraguan para pengkritik ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para penyelenggara pendidikan, baik di tingkat satuan pendidikan maupun pengambil kebijakan. Misalnya, portofolio instan tidak akan mampu mencerminkan tingkat kemampuan seseorang dalam menguasai satu bidang profesi. Manipulasi sertifikasi atau aktif dalam kepesertaan berbagai kegiatan ilmiah tanpa di landasi motif pembelajaran hanya akan melahirkan formalisme belaka. Bahkan loncatan jumlah sertifikat (bukti seminar) hanya sekedar loncatan formalisme administrasi dan hal ini tidak signifikan dijadikan landasan dalam mengukur kompetensi seseorang. Padahal, disisi lain, Ali (2005:24) kompetensi unggul merupakan syarat untuk meningkatkan profesionalisme guru.

Gonjang Ganjing Sertifikasi

Kalau memperhatikan pemberitaan, keberadaan sertifikasi guru ini, belum berada pada posisi yang stabil. Kehadirannya, kendati secara hukum sudah resmi atau syah, namun keberadaannya tetap saja memancing komentar yang kurang menguntungkan pada keberadaan program sertifikasi guru.

Misalnya, perhatikan saja, pemberitaan pada Media Indonesia, yang melansir pemberitaan dari Bank Dunia.

ANGGARAN besar, hasil kerdil, itulah ironi pendidikan Nasional. Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN yang telah dijamin konstitusi ternyata tidak mampu membuat kualitas pendidikan kita menjadi lebih baik.

Anggaran besar telah dihabiskan, tetapi kualitas pendidikan kita tetap jalan di tempat. Salah satu indikatornya ialah program sertifikasi guru yang dinilai gagal meningkatkan kualitas guru dalam mengajar.

Hasil survei Bank Dunia tentang kegiatan belajar-mengajar pada 2011 di beberapa negara, termasuk Indonesia, yang dirilis di Doha, Qatar, Kamis (15/11), menegaskan kegagalan program yang telah berlangsung selama lima tahun tersebut.

Hasil survei itu secara eksplisit menyimpulkan program sertifikasi guru tidak mengubah kualitas kegiatan belajar-mengajar di kelas.¹

Pernyataan serupa itu, tidak satu kali, dan bukan kali ini aja. Media massa khususnya, dan pengamat pendidikan umumnya, kerap kali memberikan komentar serupa mengenai program sertifikasi guru. Kritikan, atau komentar yang miring mengenai program sertifikasi terus terjadi.

Bila diperhatikan dengan seksama, sejak bergulir dan dilaksanakannya program sertifikasi guru ini, tahun 2008, sampai saat ini, kritikan itu terus mengalir. Kritikan itu sulit

¹ Media Indonesia. November 2012. Sumber <http://www.mediaindonesia.com/read/2012/11/17/363403/70/13/Sertifikasi-Guru-yang-Gagal#docu>

terbendung, karena para guru atau para pembela guru sulit mengendalikan media massa. Media massa saat ini, kalau tidak dikuasai pengusaha, tentu dikuasai oleh penguasa. Sementara guru –khususnya guru pendidikan dasar dan menengah, berada pada posisi sebagai objek atau sasaran kritik.

Perlu ditegaskan di sini. Secara pribadi, saya termasuk orang yang tidak paham. Bila banyak akademisi di tingkat perguruan tinggi melakukan kritik pedas terhadap program sertifikasi, dan kemudian menunjukkan pada guru di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Padahal, program sertifikasi itu sendiri adalah untuk guru dan dosen. Secara ekonomi, kehadiran program sertifikasi itu sendiri, memberikan dampak positif bagi dosen atau akademisi tersebut. Sayangnya, para pengamat yang berasal dari kampus itu, lebih senang menyerang guru SD-SMA yang tidak memiliki akses ke media massa, daripada melakukan outakritik terhadap pelayanan pendidikannya sendiri.

Namun, karena wacana ini tidak bermaksud untuk mengulas aspek yang satu itu, maka persoalan ini, biarlah menjadi bahan pemikiran kita saja. Pada kesempatan ini, saya hanya ingin menegaskan bahwa disaat gonjang ganjing program sertifikasi ini, para guru dituntut untuk unjuk kemampuan dalam memberikan layanan pendidikan.

Jangan biarkan kritikan itu mengalir. Apalagi disertai dengan ketidakseriusan para guru dalam memperbaiki pelayanan pendidikan. Karena, bila hal itu dibiarkan, maka ujung kritikan itu, kerap kali mengarah pada satu hal yang nyata, sebagaimana yang juga diusung oleh Media Indonesia. Kritikan itu, mengarah pada satu kesimpulan, bahwa sertifikasi

profesi guru tidak berdampak langsung, atau tidak berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Dalam Media Indonesia, tertera tulisan yang nyata, bahwa :²

Karena itu, kita khawatir, pelaksanaan program yang bertujuan mulia itu dalam praktiknya lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat. Alih-alih meningkatkan mutu pendidikan dan menyejahterakan guru, kita khawatir, program itu telah berakhir sebagai sumber pemborosan.

Karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mengevaluasi secara menyeluruh. Jika perlu, hentikan saja program itu. Jangan biarkan program itu menjadi inefisiensi baru.

Itulah dan inilah, program sertifikasi guru di Indonesia. kendati sudah ada UU-nya, namun tetap digoyang oleh berbagai kalangan. Nasib guru bagaimana, nasib dunia pendidikan mau ke mana ?

Untuk menjawab komentar ini, kiranya, dapat direnungkan komentar dari Rakean Agung, dari Universitas Krisnadipayana Jakarta, saat mengomentari tulisan dari Media Indonesia dimaksud :³

Booom.bom atom jatuh di negeri Sakura itu, meluluhlantakan segalanya.Nagasaki dan Hiroshima jadi saksi bisu itu semua.Itulah, akhir dan awal

² Loc.cit. Media Indonesia. November 2012.

³ Loc.cit. Media Indonesia. November 2012.

kebangkitan bangsa Jepang. Akhir, dari dominasi dan kejayaan militer dan kaum Samurainya, serta awal dari kebangkitan kaum sipil, sukses dan maju dari keterpurukan, terutama dibidang ekonomi dan teknologinya..bahkan sepak bolanyapun maju pesat, padahal konon mereka belajar dari Galatama dari kita. Itulah, fakta yang tak terbantahkan utk kemajuan Jepang, sebagai bangsa dan negara samapi mendapat julukan binatang ekonomi..segala! Adalah, sosok sang Kaisar, paska perang yang menanyakan berapa jumlah guru yang tersisa dari korban perang itu! Intinya, adalah betapa penting nya peran guru dan pendidikan dalam memajukan suatu bangsa! Maukah, kita belajar dan berguru dari mereka..dengan semangat Bushidonya...Osss!

Untuk konteks bangsa kita, saya sendiri belum memahami banyak hal. Apa yang mau diutamakan, dan apa yang akan dilakukan ? bila pendidikan menjadi prioritas, kenyataannya masih banyak 'pr' yang harus dikerjakan. Termasuk masalah program sertifikasi guru ini.

Tidak terkecuali, walaupun posisi dan makna sertifikasi masih menjadi pembicaraan dan mengalami kegonjang-ganjingan yang tidak berkesudahan, karena status sebagai guru pada sebuah lembaga pendidikan dasar dan menengah, kewajiban menjalani prosesi sertifikasi tetap harus dijalani.

Tidak Percaya

Rabu, 15 Agustus 2012. Kami sekeluarga sudah berkemas merencanakan mudik ke kampung halaman, Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Sudah jauh hari, menetapkan tanggal kemudikan. Bahkan, sudah jauh hari pula, memesan jemputan kendaraan ke kampung halaman. Tidak jauh-jauh, dan tidak sulit-sulit. Hari itu, kami pun menetapkan untuk kembali memanfaatkan rekan seprofesi yang memang hendak ke kampung halamannya, Sumedang, yang hendak mudik dalam waktu bersamaan.

Saat itu, kami sudah sepakat. Dengan maksud menghindari kemacetan di jalan. Atau juga menghindari penatnya perjalanan Bandung – Majalengka, direncanakan berangkat dari Bandung pukul 05.00 WIB, di esok hari. Rencana ini, terasa sudah matang, dengan berbagai perhitungan.

Sebelum magrib, kami sudah mengontak ke Ustadz Jajang Arka, yang memang merencanakan mudik ke Kabupaten Sumedang. Satu arah, satu perjalanan, dan satu waktu. Itulah yang mengikat kami untuk mudik bersama. Pada kesempatan itu, sayalah posisi ikutan, karena kendaraan itu menggunakan mobil milik Ustadz Jajang. Setelah beberapa saat berbincang, dan menyepakati berangkat dari Bandung pukul 05.00 WIB, malam itu pun, kami sekeluarga merencanakan memulaskan tidur terakhir ramadhan di Kota Bandung.

Tidak di sangka-sangka. Pukul 21.00-an. Selepas shalat tarawih. Terdengar bunyi ringtone. Nomor mantan

pimpinan kami, yang kini sudah pindah tugas ke Kabupaten Sumedang, mengontak. Tanpa ada prasangka apapun. Bunyi ringtone itu dianggap biasa, karena memang beliau biasa mengontak malam hari, dan guyonannya gayanya sendiri. Sehingga, di malam itu pun, tidak pernah ada prasangka sedikitpun.

“wayahna, besok ke kementrian kota bandung, ambil surat tugas untuk mengikuti Ujian Kompetensi Awal (UKA),” katanya. Setengah memerintah. Dengan pernyataan itu, sontak saja, kaget dan bercampur bingung.

“besok saya mau mudik ke kampung halaman...” jawabku. Saya merasa keberatan, bahkan, sempat pula mengajukan pertanyaan, “boleh tidak diambilnya setelah lebaran saja ?” mendengar ajuan itu, beliau malah menjawab, “mudik itu bisa ditangguhkan, ini adalah masalah masa depan..”paparnya lagi.

“boleh tidak diambilkan sama orang lain, misalnya ?” pintaku sekali lagi. Mendengar komentar keberatanku waktu itu, dia malah menjawab, “udah, pokoknya besok jam delapan di tunggu di kementerian, hubungi staff di sana, ambil surat tugas. Titik.” jawabnya tegas lagi.

Saya tahu. Saya sadar. Saya paham. Gaya bicara pimpinanku ini, sejak bertugas di MAN 2, dikenal sebagai orang yang tegas, tidak mau basa basi. Karena itu pula, saya tidak bisa berpanjang-panjang cakap dengan beliau, setelah mengucapkan terima kasih atas

informasinya, kami pun berusaha untuk mengkondisikan kembali rencana keluarga untuk mudik.

Selepasnya ditutup komunikasi dengan beliau, langsung saya komunikasikan dengan istri mengenai rencana pengunduran jadwal mudik. Beliau pun memberikan saran, “tidak apa-apa di undurkan, yang penting pekerjaan dan tugas dapat diselesaikan dulu..”sarannya. saya merasa senang, dengan saran itu, istriku memahami posisi sulit suaminya saat itu.

Kemudian, komunikasi pun dilanjutkan ke Ustadz Jajang, untuk melakukan reschedulling tentang jadwal mudik. Sebenarnya, saya merasa malu olehnya. Mobil miliknya. Tetapi, acara mudik ke kampung halaman, malahan keluargakulah yang mengaturnya, seolah acara mudik itu milik keluarga kami, bukan agenda keluarganya. Saya merasa beruntung, keikhlasan dan pengertian dari ustadz mata pelajaran Aqidah Akhlak di MAN 2 Kota Bandung, agenda mudik ini dapat dengan mudah direncanakan ulang.

“insya Allah, kami tidak merasa ada masalah. Jama berapapun kita mudik, Insya Allah kita siap. Besok saja, kepastiannya, nanti kita siapkan kembali...” paparnya. Sebuah jawaban yang menyejukkan dan meringankan masalah keluarga kami. Dan dengan jawaban itu pula, kami dapat tidur dengan pulas di malam terakhir ramadhan di kota Bandung.

Janji dan dijanjikan harus kumpul pukul 08.00, saya pun berkemas menuju ke Kementerian Agama. Maksud dan tujuannya adalah mengambil surat tugas mengenai Uji Kompetensi Awal (UKA) bagi guru di lingkungan Kementerian Agama Kota Bandung. Berangkat dari rumah sekitar pukul 07.30-an. Sepagi itu, berangkat dengan harapan, di kantor Kementerian masih pagi, dan bisa bertemu dengan pejabat di maksud.

Kendaraan roda dua yang dikendarai melaju dengan cukup kencang. Kekencangan laju kendaraan ini, perasaan sih sudah sangat kencang, walaupun kata orang kecepatan yang tidak lebih dari kecepatan kura-kura berjalan. Speedometer menunjukkan angka 4-60 km/perjam. Itulah kecepatan yang biasa dan bisa saya lakukan, di setiap naik kendaraan roda dua ini. Tidak lebih dari itu.

Di tengah perjalanan, saya melihat ada *mio* merah. Perasaan tidak asing. Kenal. Baik flat nomor maupun penumpangnya. Hanya saja, mengapa ada di jalan raya ini, dan hendak ke mana beliau ?

“ya, itulah pak Aa Solehuddin.” Sontak saja, saya klakson dia, dan kemudian dia pun meminggir dan menghentikan kendaraannya, tepat di Kantor Pos di Jalan Soekarno

Hatta Bandung. Saya pun turut berhenti. “Mau ke mana, Pak ?” sapaku.

“mau bayar pajak, tapi ingin belanja dulu ke toko di depan...” jawabnya. Saya kenal persis, guru putra yang satu ini, dikenal sebagai guru yang memang paling lengkap dari sisi perlengkapan. Berbagai alat tulis, alat makan, atau pun kebutuhan kecil seperti gunting, pisau, charger ponsel, dan benang kain, tersedia di lacinya. “lengkap !” tukas seorang ibu yang ada di samping meja beliau. “Pak Mon, mau kemana ?”

“ke kementerian, ambil surat tugas UKA.” Jawabku singkat.

“Alhamdulillah, kapan UKA-nya ?” tanyanya lagi. “Ini kalau, kalau bukan hari sabtu besok, Haji Abdurrahman, ngajak buka bersama, mau gak ?” tawarnya lagi. Mendengar tawaran itu, kebingungan sempat mampir dalam pikir ini. Haji Abdurrahman, adalah sahabat lama, yang memang sudah lama tidak berjumpa. Saat ini ngajak buka bersama, bahkan menurut Informasi Pak Aa, buka bersama kali ini, diharapkan dengan anggota keluarga, dan biaya akan ditanggung oleh Haji Abdurrahman. Sebuah acara yang indah di bulan ramadhan, shilaturahmi yang memang menyimpan keberkahan. Tetapi, kebingungan itu malah mampir di pikiran.

“mohon maaf, Pak Aa., ini pun belum jelas, kapan UKA. Malahan, hari ini pun, saya merencanakan mudik dengan

ustadz Jajang, “jawabku. Setelah berbincang ke sana ke mari, kesimpulan sementara, bergantung pada keputusan UKA dari kementrian. Setelah kami, lalu kendaraan pun dipacu kembali, hingga sampai ke kementerian. Sementara arah jalan Sahabatku yang satu ini, entah ke mana, saya pun tidak hirau lagi terhadapnya.

“Ada apa, pagi-pagi ke sini ?” ujar Pak Alex, seorang staff di Kementerian. Pertanyaan yang langsung disodorkan sesaatnya, wajah ini nongol di ruangan seksi Mapenda Kementerian Agama Kota Bandung. Saya melihat kondisi ruangan itu masih sepi, dan tamu pun, saya lah orang yang pertamanya.

“mau mengambil surat tugas UKA ?” jawabku polos. Mendengar penjelasan itu, sontak saja, pak Alex bingung. Karena, dirinya pun tidak tahu, apa yang dimaksud dengan surat tugas, dan darimana surat itu berasal.

“Maksudnya, Apa ?” balik tanya, “tidak ada surat tugas, dan kami belum menerima apapun mengenai sertifikasi ini..”paparnya. mendengar jawaban itu, saya sampaikan kepada beliau, bahwa saya mendapatkan informasi dari teman (tidak menyebutkan orang), dan teman itu mendapat informasi dari staff di kementerian ini. Beliau menyuruhku hadir ke sini sekarang, paparku kepadanya.

Mendengar seorang staff Mapenda di sebutkan, kemudian dia pun sempat kaget, dan sedikit bertanya-tanya, “kenapa tidak langsung saja kepadanya ?” saya

jawab, bahwa beliau berharap diambilnya ke sini langsung. Dengan penjelasan seperti itu, pak Alex malah bingung.

“sudahlah, begini aja. Bapak mudik saja ke kampung halaman dulu, tenang saja. Surat tugas UKA, akan disampaikan kelak selepas idul fitri. Karena surat itu belum ada. Adapun, keikutsertaannya, memang, nama bapak ada dalam faftar peserta UKA sekarang”, jawabnya, setelah membuka file peserta UKA Kemenag Kota Bandung, yang akan dilaksanakan di Universitas Pendidikan Indonesia.

“Oh, jadi hari ini, saya bisa pulang ?” tanyaku memastikan.

“emangnya mua apa ?”, jawabnya lagi, “tidak ada kegiatan apa-apa di kemenag ini. Sampai lebaran kita tidak memiliki agenda apapun”. Jawabnya lagi. Mendengar jawaban itu, lega sudah dalam diri ini. Informasi ini, langsung menjadi bekal untuk memastikan acara mudik sekitar pukul 10.00 WIB, dan membatalkan acara dengan Haji Abdurrahman.

Semula dianggap akan ada berita luar biasa, ternyata hari kamis ini, berjalan seperti biasa saja.

Agustus. September. Oktober. Berlalu tanpa ada berita. Pelaksanaan UKA sudah terlewati. Tetapi, informasi kelanjutan dari sertifikasi profesi ini, belum juga turun. Tiada ada berita lain, kecuali ada kalimat, “belum ada informasi baru”. Itulah jawaban dari beberapa pihak, yang ditanya, dan dianggap tahu mengenai kegiatan PLPG lingkungan Kementerian Agama Kota Bandung.

Di akhir September, sempat ada informasi, bahwa PLPG di Kemendiknas, sudah mendekati gelombang terakhir. Di duga, awal Oktober jadwal PLPG bagi guru-guru dari lingkungan Kemenang. Awal oktober sudah diinjak, informasi itu tak ada. Pertengahan Oktober sudah tercium, informasi pun masih kabur. Hingga akhirnya, akhir Oktober sudah terbuka, informasi mengenai PLPG masih tetap juga tertutup.

Banyak informasi yang kian mengaburkan masalah ini. Di sela-sela penantian itu, ada yang mengatakan, teori sertifikasi di Indonesia sangat jelas, katanya, (a) gelombang pertama, agak telah, (b) gelombang kedua, cair setengahnya, (c) gelombang ketiga cairnya telat, (d) gelombang keempat, sertifikasi dipertimbangkan kembali, dan berikutnya gelombang terakhir, program sertifikasinya itu sendiri yang dicabut dengan alasan pemerintah mengalami kekurangan anggaran untuk membiayainya.

Ada juga yang mengatakan bahwa, Universitas Pendidikan Indonesia sebagai penyelenggara PLPG tidak mau mengambil resiko. Sebelum ada surat kesiapan dari pihak Kemenag, tidak akan mengeluarkan surat pemanggilan PLPG kepada para guru. Hal itu terjadi, karena seluruh biaya PLPG itu dibebankan pada biaya Kementerian Agama itu sendiri. Bila pihak pemilik anggaran belum siap, maka UPI tidak akan melangsungkan pendidikan dan latihan ini.

Berbagai isu bertebaran, hingga ada sebuah pernyataan, “ah, terserah negara, ada sertifikasi yang alhamdulillah, tidak ada pun, mungkin bukan rizki kami saat ini...” ujar seorang ustad, yang juga lelah menanti informasi PLPG ini. Beliau itu jauh lebih lelah dibandingkanku, karena pelaksanaan UKA dan pemberkasan PLPG-nya jauh lebih awal dibandingkan penyelenggaraan UKA oleh UPI. Sayangnya, sampai wacana ini ditulis dan hampir selesai PLPG UPI, beliau ini belum mendapatkan informasi apapun mengenai nasib sertifikasi profesinya sendiri. Kelompok beliau itu, adalah kelompok PAI, dan diselenggarakan oleh Univesitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

Pergi Untuk Diklat

Saya tidak tahu, apa yang harus dikatakan. Apakah keikutsertaan dalam program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) merupakan sebuah berkah, atau musibah ? bagi, kebanyakan orang, atau setidaknya, ada sebagian guru memandang keterpanggilannya seseorang untuk ikut serta dalam PLPG merupakan berkah. Betul, itu adalah sebuah berkah, karena kita akan mendapatkan tunjangan sebesar satu kali gaji di setiap bulannya. Bukankah, tunjangan sebesar itu merupakan tunjangan yang bisa menguntungkan bagi seorang guru ?

Daya tarik itulah, yang kemudian, banyak pihak bersabar diri untuk antri dalam daftar tunggu (*waiting list*), walaupun harus menghabiskan waktu bertahun-tahun. Ada pula yang berrela diri untuk melakukan ‘pelacuran profesi’ dengan jalan pintas, hanya untuk mendapatkan tunjangan profesi. Untuk kasus yang terakhir ini, insya Allah akan kita tuturkan dibagian yang lainnya. Cukup untuk kesempatan ini, saya mengatakan bahwa, keterpanggilan saya kali ini, termasuk sesuatu yang membingungkan bagi diri sendiri. Apa yang harus saya artikan, dengan semua ini, berkah atau musibah ?

Hal yang pasti, tanggal 2 November 2012, ada surat tugas dari Kementerian Agama Kota Bandung yang menetapkan dan memastikan bahwa nama Momon Sudarma, ditugaskan untuk mengikuti Program PLPG, dan menurut catatan surat itu, “tidak akan pemanggilan yang kedua”. Kalimat yang terakhir, yang tertera pada surat

itu, seakan menegaskan bahwa ‘memanfaatkan peluang dan kesempatan itu sangat penting, dan tidak akan terulang untuk kesempatan yang kedua kalinya’.

Berbekal pikiran seperti itulah, senin pagi, tanggal 5 November 2012, setelah berpamitan diri kepada anak istri dan juga rekan seprofesi, baik di Madrasah maupun di Sekolah Tinggi (Stikom dan Stikes), saya pun pergi ke Lembang, dengan tujuan Vila Melati Putih di daerah Cibogo Lembang.

Senin, 5 November, pukul 06.15 WIB sudah hadir di madrasah. Maksud awal ke madrasah ini, untuk menggenapkan kewajiban diri sebelum meninggalkan tugas selama sepuluh hari lamanya. Di hari senin itu, rekan-rekan seprofesi, dan juga anak-anak tengah mempersiapkan diri guna mengikuti kegiatan upacara bendera.

Kebetulan. Sewaktu finger print di ruang Tata Usaha, bertemu dengan kepala. Setengah rasa kaget, karena terasa mendadak, beliau pun memberikan izin kegiatan, dan mendoakan supaya bisa selamat dan sukses dalam menjalani PLPG kali ini. Saya maklum, bila kepala madrasah merasa kaget dengan tugas PLPG ini. Jangankan orang lain, saya sendiri merasa tidak memiliki waktu untuk menuntaskan berbagai persyaratannya, hingga siang itu, pukul 10.00-11.00 WIB jadwal check ini di penginapan, saya harus menyelesaikan satu persyaratan lagi yang tidak mudah, yaitu melagalisir Surat Keterangan oleh pihak Kementerian Agama. Untuk

yang satu ini, saya sebut tidak mudah, karena pejabat penanda tangannya belum tentu ada di lokasi. Itulah masalahnya. Sementara waktu check ini, adalah hari ini, siang ini, di Lembang yang akan memakan waktu kurang lebih 1,5 jam perjalanan motor yang kukendarai.

Sertifikasi Mazhab Diklat

Pasca diberlakukannya kebijakan sertifikasi profesi, muncul kegairahan kerja pada dunia akademik. Bila ada yang sempat melakukan observasi ke lingkungan kerja pada dunia pendidikan saat ini, jangan heran bila melihat ada sejumlah perubahan sosial yang dilecut karena kebijakan sertifikasi profesi terhadap guru (tenaga pendidik). Tenaga pendidik pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, pada saat ini sedang menunjukkan semangat tinggi dalam menghadapi sertifikasi profesi. Terlebih lagi, setelah adanya pengumuman mengenai hasil dari uji-sertifikasi-profesi yang dilakukan perguruan tinggi terhadap tenaga pendidik yang dipanggil pada gelombang satu dan gelombang dua.

Hal yang mencolok misalnya keinginan dari sejumlah guru untuk membuat administrasi pendidikan selengkap mungkin. Mulai dari analisis kurikulum, analisis materi, sampai pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam menggenapkan kebutuhan tersebut, aktivitas

dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler pun dilakukan dengan lebih baik dengan harapan dapat dijadikan portofolio tambahan yang bisa mendukung pada kesuksesannya mengikuti sertifikasi profesi.

Perubahan-perubahan gairah kerja tersebut sudah tentu merupakan indikasi yang positif bagi dunia pendidikan. Artinya, adanya perubahan gairah kerja sesuai dengan kaidah-kaidah profesi keguruan itu akan sangat menunjang pada upaya peningkatan mutu dan layanan pendidikan pada dunia pendidikan di Indonesia.

Namun demikian, bila hal ini terjadi pada aspek yang tidak selaras dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan, maka sudah sewajarnya skeptisisme sebagian kalangan akan menjadi sebuah kenyataan.

Ada yang mencoba untuk melontarkan keraguannya mengenai hubungan (korelasi) antara peraihan sertifikat profesi dengan peningkatan profesionalisme. Mereka meragukan terhadap manfaat sertifikasi profesi bila dikaitkan dengan prosedur atau pelaksanaan sertifikasi itu sendiri.

Pertama, jawaban itu akan menjadi sesuatu yang bernilai positif bila peserta sertifikasi dan asesornya mampu mengangkat nilai-nilai esensial dari kebijakan sertifikasi. Tim asesornya jangan seperti DPR zaman Orba yang sekedar menjadi “cap stempel” bagi lancarnya sebuah program pemerintah. Pada konteks ini, objektivitas dan kejelian asesor atau tim verifikasi

persyaratan administrasi sertifikasi akan menjadi penentu utama dalam mengangkat hakikat dan tujuan sertifikasi profesi.

Bila harapan tersebut tidak mampu dijawab oleh tim verifikasi, maka sandaran berikutnya adalah diserahkan kepada peserta sertifikasi itu sendiri. Kesungguhan dan kejujuran serta objektivikasi dalam evaluasi diri akan menjadi sumbangsih penting terhadap ketercapaian tujuan diselenggarakannya sertifikasi profesi di Indonesia.

Kedua, pelaksanaan sertifikasi profesi secara prosedur dan legal memang tidak memiliki makna ganda. Satu sisi, merupakan bentuk penghargaan kepada tenaga pendidik terhadap kerja-kerja profesinya, dan disisi lain merupakan prasyarat untuk mendapatkan kenaikan tunjangan kesejahteraan (yang kemudian di sebut tunjangan profesi). Sayangnya, ide normative yang pertama tenggelam oleh kebutuhan pada aspek yang kedua, sehingga muncul dan berkembang persepsi bahwa sertifikasi profesi itu bukan untuk meningkatkan profesionalisme, namun sekedar untuk mendapatkan “tunjangan profesi”.

Kekhawatiran berkembangnya motif yang kedua, sempat saya kemukakan pada sosialisasi sertifikasi pada MGMP geografi (2007). Pada konteks itu, saya melihat bahwa kegairahan guru dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti sertifikasi cenderung tidak didorong oleh motif

untuk meningkatkan profesionalisme, namun lebih sekedar karena motif ekonomi. Persepsi ini mungkin terlalu mengada-ada, terlalu menggeneralisir, dan saya pun berharap pandangan tersebut ‘tidak benar’.

Saya teringat pada ungkapan seorang ustad, bahwa “bila seseorang berniat mencangkul maka mencangkul dengan baik, adapun ketika mencangkul menemukan biji-bijian yang bisa dikonsumsi silahkan manfaatkan. Jangan dibalik.” Begitulah nasehatnya. Peribahasa ini menarik dan dapat dijadikan cermin untuk memahami kebijakan sertifikasi profesi.

Andai saja, para guru memiliki niat untuk meningkatkan sikap profesional dalam melaksanakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, bukan hal yang mustahil akan muncul apresiasi dan penghargaan baik dari pemerintah maupun publik (orangtua siswa) kepada para guru tersebut. Apresiasi itu bisa berwujud penghargaan sosial dan sangat mungkin di tunjukkan dalam bentuk ekonomi.

Munculnya sekolah atau madrasah yang menjadi favorit saat ini adalah bentuk nyata dari hasil profesionalisme kerja para guru. Dengan kerja-kerja yang professional dari tenaga pendidik dan kependidikan dalam lembaga tersebut, kemudian banyak pihak, baik dari orangtua ataupun dunia industri dan dunia usaha yang datang secara sukarela untuk memberikan penghargaaannya secara ekonomi maupun yang lainnya.

Pengalaman pahit akan dirasakan bila kita berniat mencari ekonomi dengan menomorduakan profesionalisme. Mungkin benar, upaya untuk mendapatkan tunjangan profesi itu akan diraihinya namun penghargaan sosial baik dari pemerintah maupun masyarakat akan sangat miskin.

Dalam era kompetisi ini, tidak ada sekolah negeri maupun swasta, tidak ada sekolah ataupun madrasah, semuanya akan berhadapan dengan masyarakat sebagai pasarnya. Bila satuan pendidikan menafikan kualitas layanan pendidikan, bukan hal mustahil akan menjadi awal kehancuran dunia pendidikan pada umumnya.

Berhadapan dengan kenyataan itu, dalam menghadapi sertifikasi profesi ini, saya mengajak kepada seluruh tenaga guru untuk tetap memegang idealisme (sekecil apapun) yang dimilikinya. Profesionalisme adalah harta terbesar yang dimiliki oleh dunia profesi. Bila harta ini sudah hilang, maka yang tersisa hanyalah bungkus belaka. Sementara “cangkang” (bungkus) bukanlah gambaran yang sesungguhnya mengenai isi dari yang dibungkusnya tersebut.

Ketiga, bila motif profesi sudah tenggelam oleh motif ekonomi, potensial melahirkan perilaku kalangan tenaga profesi yang kurang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan sertifikasi profesi. Upaya mengumpulkan berbagai persyaratan sertifikasi, yang

berbentuk portopolio adalah instrument nyata yang potensial lahirnya perilaku yang tidak diinginkan. Lelucon pada kalangan tertentu, permainan ini merupakan bentuk nyata dari kebiasaan pemerintah yang ingin dibohongi.

Pemerintah saat ini, mau dibohongi oleh anak didik. Melalui hasil UN, pemerintah merasa dan menganggap sudah berhasil setelah melihat prosentasi anak didik yang lulus dari ujian UN, bahkan mampu mendapatkan nilai yang sangat baik (sangat memuaskan). Pada konteks inipun, menurut kalangan kritis, pemerintah bisa terkena oleh tipuan-administratif tentang dunia pendidikan. Hasil-hasil dari UN adalah sesuatu hal yang menarik untuk dijadikan objek kajian, apakah raihan nilai UN itu akademik atau politik ? raihan nilai UN itu apakah objektif atau manipulatif ? mitos atau realitas ?

Dalam bentuk yang sama, tingginya kelulusan para guru dalam mengikuti kegiatan sertifikasi profesi, akankah merupakan sesuatu hal objektif atau manipulatif ? mitos atau realitas ? pertanyaan seperti ini sudah tentu bukan berarti kita skeptis terhadap kemampuan para guru yang ada saat ini. Dengan berbagai kemampuan yang sudah dimilikinya, serta berbagai pengakuan yang sudah didapatnya (misalnya dengan bukti adanya ijazah akademik atau akta IV) merupakan bentuk nyata dari kemampuan-kemampuan minimal dari tenaga pendidik itu sendiri.

Hanya saja, bila dikaitkan dengan tujuan sertifikasi profesi, kemampuan minimal itu saja adalah tidak cukup. Karena bila kita mendapatkan sertifikasi profesi saat ini, sementara kemampuan dan kinerja pelayanan pendidikan kita masih sama seperti sebelum mendapatkan sertifikat profesi, maka mutu pendidikan dan mutu lulusan pendidikan di Negara kita tidak akan jauh berbeda dengan yang pernah kita lahirkan saat ini. Hukum alam akan menyatakan bahwa “kita tidak akan mampu melahirkan generasi muda yang baru dan berkualitas unggul seperti yang diinginkan, bila kinerja kita saat ini masih seperti saat melahirkan generasi yang ada saat ini”.

Berdasarkan pertimbangan ini, ada dua hal penting yang perlu dikemukakan saat ini terkait dengan pelaksanaan sertifikasi profesi tenaga pendidik.

Pertama, mari kita ambil sikap tegas dan objektif terhadap apa yang sudah dilakukan selama ini. Melalui sikap ini, kita dapat berusaha keras untuk menyusun dan mengumpulkan portofolio yang belum ada secara maksimal, sepanjang memang itu pernah kita lakukan. Sikap ini adalah sikap yang bijak dan objektif dari diri kita terhadap diri dan dunia pendidikan.

Secara pribadi saya mengajak untuk mengambil pendidikan profesi (satu minggu atau beberapa hari) dibandingkan dengan mengada-ada sesuatu hal yang tidak dilakukan. Dengan diklat profesi kita sudah

terhindari dari manipulasi diri, dan kita diajak untuk transparan terhadap kemampuan diri. Istilah yang penulis gunakan di lingkungan teman-teman yaitu mengajak para guru untuk masuk *mazhab-diklat* dibandingkan harus bersusah-susah ria memanipulasi diri. Bahkan saya memandang mazhab ini lebih positif dibandingkan dengan model sertifikasi “saat ini”.

Kedua, siapa yang akan menghargai profesi ini selain para “professor” itu sendiri. Bila sebagai profesornya tidak mampu menunjukkan sikap-sikap professional terhadap profesinya, jangan harap orang lain akan menghargai profesi tersebut. Anekdote yang akan muncul, “yang merusak citra profesi itu adalah profesornya sendiri”. Dalam kaitan dengan masalah ini, saya mohon maaf, mungkin tulisan ini pun akan menjadi alat kritik sebagian kalangan, bahwa saya pun merusak citra profesi tenaga pendidik ini. Namun, saya berfikir bahwa sikap inilah yang harus diungkapkan dan disampaikan kepada para guru di Indonesia pada umumnya.

Junjung profesionalisme demi martabat profesi, dan dunia pendidikan itu sendiri !! itulah, pekikan tahun 2008 lalu. Pekikan dan ajakan ini, teringat kembali, dan kini, saya pun merasakan dan harus menjalani sertifikasi dari mazhab diklat kali ini.

Selain itu, saya pun menulis opini dengan tema cara mudah mengumpulkan portopolio. Sengaja tulisan ini dikemukakan, dan dimuat di harian umum Nasional,

dengan maksud untuk mengajak rekan-rekan profesi untuk menghadapi proses sertifikasi dengan cara yang elegan.

Cara Mudah Mengumpulkan Portopolio

Ketika banyak guru, baik di tingkat pendidikan dasar maupun menengah sibuk mengumpulkan data-data portopolio, ada orang yang tampak dengan santai menghadapinya. Pada ukuran tertentu, sikap santainya orang tersebut memang dipandang karena dia dianggap sebagai orang yang sudah bisa lolos dari standar minimal nilai (point) yang dituntut oleh panitia penyelenggara sertifikasi tenaga pendidik di Indonesia. Selain karena masa kerja yang lama, dan juga aktivitas sosialnya yang tinggi di sekolah tersebut. Namun pada sisi lain, dia sendiri mengaku belum melakukan persiapan yang matang bila kelak terpanggil untuk mengikuti seleksi sertifikasi. Hanya saja, secara sederhana dia menjawab bahwa “daripada melakukan sesuatu hal yang tidak pada tempatnya, lebih baik mengambil jalur diklat”. Itulah sikap tegas yang dimilikinya saat itu. Sehingga ada sebagian teman, menyebut dirinya sebagai guru bermazhab diklat dalam menghadapi sertifikasi. Sikap mengambil jalur diklat ini, ternyata bukan dilandasi oleh sikap pesimistik. Sikap ini malah merupakan sikap objektif dan wajar untuk diambarnya.

Sementara bila diminta pendapat tentang syarat-syarat minimal lulus sertifikasi sebagaimana yang diajukan Pemerintah, dia memberikan sebuah penjelasan bahwa ada cara mudah yang bisa dilakukan. Untuk sekedar contoh, bila ada perlombaan yang diperuntukkan kepada siswa, adakah guru yang mau membimbing mereka untuk turut serta dalam mengikuti kegiatan tersebut ? bila ada, dan kemudian anak didik kita tidak sampai meraih juara, sebagai pembimbing kita sudah mendapatkan nilai point 5 (lima), satu nilai yang lebih besar daripada seminar untuk tingkat Kabupaten/Kota.

Untuk mengisi karya pengembangan profesi, bila dihadapkan pada tugas untuk membuat buku, artikel di media massa, atau reviewer serta modul pelajaran agak susah. Kita tidak perlu memikirkan karya-karya dalam bentuk tersebut. Biarkan karya-karya tersebut hanya menjadi kejaran bagi mereka yang memiliki waktu yang luang dengan minat menulis yang tinggi, sementara bagi kita yang kurang memiliki kedua modal tersebut, dapat mengambil cara yang berbeda. Sekali lagi untuk sekedar contoh, kita dapat membuat media/alat pelajaran. Media/alat pelajaran apa yang bisa dibuat oleh seorang guru di lapangan ?

Seorang guru geografi di sekolah Swasta yang ada di wilayah Timur Kota Bandung, ada yang membuat media/alat pelajaran dengan cara menyanyi. Kebiasaan dan hobi menyanyinya, kemudian disalurkan dan dikembangkan bersama-sama anak-anak, sehingga

pada akhirnya melahirkan “*lagu-lagu Indi*” yang terkait erat dengan pelajaran lingkungan atau cinta lingkungan. Karya ini monumental. Dalam nalar penulis, sudah pasti tim asesor sertifikasi perlu mengapresiasi hal ini. Seorang guru kimia, ada yang berhasil merumuskan cara menghafal sistem periodik dengan di”nyanyikan”. Guru antropologi di sekolah swasta di daerah Sukajadi menggunakan kartu pelajaran dalam meningkatkan minat belajar, serta melatih kemampuan cerdas-cepat dalam antropologi. Guru bahasa Inggris membuat kartun sebagai alat/media pelajaran dalam meningkatkan daya naratif para siswa. Contoh-contoh yang disebutkan tersebut, merupakan sebagian dari upaya cerdas para guru dalam meraih nilai “karya pengembangan profesi” dalam bidang pengembangan media/alat pelajaran. Sekali lagi, bila kegiatan ini dilakukan, maka nilainya pun lebih tinggi dari seminar tingkat kabupaten/kota.

Selain itu, ada sebagian orang yang merasa kaget, terkesima, atau merasa tersentak bila dihadapkan pada tuntutan untuk membuat karya ilmiah, khususnya yang terkait dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Pada kelompok portopolio ini, banyak guru yang minder atau under estimate terhadap kemampuan diri dalam menyusun sebuah karya PTK.

Banyak faktor yang mendukung munculnya sikap minder para guru dalam bidang PTK, diantaranya banyak celotehan, opini, atau fakta yang menunjukkan para guru mentok di golongan IV-a untuk naik ke IV-b dengan

alasan harus ada karya tulis. Hal ini kian menguatkan bahwa guru di tingkat pendidikan dasar dan menengah sangat lemah dalam membuat sebuah karya ilmiah. Opini semakin mengkristal atau membeku, dengan lahirnya persepsi mengenai PTK sebagai sebuah bentuk karya ilmiah, sehingga pada akhirnya ‘trauma skripsi’ di masa penuntasan keserjanaan masa lalu muncul lagi dalam dirinya. Pada konteks itulah, kemudian para guru “kumeok memeh di pacok” untuk menyusun karya tulis ilmiah.

Namun demikian, apa seseram itulah makhluk yang bernama “PTK” ? saya menjawab tidak. Bagi penulis, PTK adalah upaya menceritakan dan menuliskan apa yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Jenis PTK ini, dikenal dengan nama PTK *empiric*, bukan PTK *diagnosik*. Artinya, kita hanya menceritakan apa yang dilakukan ketika kita mengajarkan sesuatu. Sekali lagi, PTK adalah menuliskan atau menceritakan apa yang dilakukan.

Ada beberapa contoh yang dapat digunakan sebagai perbandingan dalam mengukur persepsi kita tentang apa yang dimaksud PTK. Pertama, ada hasil riset seorang dosen di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan “*Peningkatan Kemampuan Berfikir Kritis Siswa dalam PKn Melalui Penerapan Model Controversial Issues*”. Masalah tersebut kemudian oleh peneliti digunakan sebagai tema pokok untuk melakukan PTK di kelas XI IPA pada sebuah SMA Negeri di Lembang. Sementara

model pembelajaran yang digunakannya yaitu dengan memberikan kartu-pokok-masalah yang akan didiskusikan oleh para siswa, sehingga mereka terlatih berfikir kritis. Secara kasat mata, dalam PTK itu peneliti menggunakan sesuatu model yang 'sederhana' yaitu melemparkan isu kontroversial, dan anak didik dibelah jadi dua blok untuk kemudian mereka diharapkan untuk mendiskusikannya. Di lihat dari masalah, sesungguhnya sangat sederhana, karena tidak jauh beda dengan diskusi kelompok, dan kemudian proses pembelajarannya ditulis, maka jadilah sebuah PTK.

Pada sebuah daftar judul PTK hasil finalis lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran tingkat nasional tahun 2003-2004, terdapat judul-judul PTK yang mudah untuk dilakukan, misalnya "upaya pengembangan moral Pancasila dengan metode riyadhoh/latihan", "Gambar Perangko sebagai media pelajaran", "meningkatkan kreativitas mengarang melalui pembelajaran di Luar kelas", Meningkatkan kualitas hasil pembelajaran mata pelajaran PAI melalui metode presentasi materi khutbah jum'at", "Peningkatan kemampuan berbicara melalui teknik bermain drama". Bila diperhatikan, judul-judul yang dikemukakan tersebut, merupakan sesuatu hal yang sangat sederhana.

Misalnya dengan judul "Gambar Perangko sebagai media pelajaran", bukankah hanya mengambil dan mengumpulkan perangko untuk digunakan sebagai media belajar ? dari media perangko itu siswa dirangsang untuk

menjelaskan setting sejarah, lokasi geografi atau moral dari objek yang digambarkannya. Begitu pula dengan judul-judul yang lainnya. Dengan kata lain, sangat mudah untuk menemukan judul-judul untuk PTK.

Memang yang kerap menghantui calon peneliti adalah menemukan judul yang tepat. Semenjak kuliah pun, kadangkala masalah judul atau tema penelitian ini “membutuhkan” waktu yang lama, sehingga tidak mengherankan bila ada sejumlah orang yang putus asa dan mengambil jalan pintas dalam menyusun skripsi. Namun hal ini tidak mesti dijadikan sebagai sebuah alasan untuk kembali mengulang kesalahan masa lalu, karena sesungguhnya tema-tema PTK itu sangat melimpah di samping kanan kiri seorang guru.

Terkait dengan pembuatan makalah, adalah aspek lain yang menjadi momok bagi para guru. Aspek ini seolah-olah merupakan sesuatu hal yang memusingkan, ribet, dan atau menyusahkan. Padahal, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mensiasati masalah ini. *Pertama*, bila kita sulit menemukan ide utama untuk penyusunan sebuah buku, bisa dilakukan dengan cara membaca buku/kitab yang tebal kemudian merangkum isi buku tersebut. Saduran merupakan salah satu model karya tulis yang diakui oleh masyarakat. Di masyarakat pun, kita dapat menemukan buku para penulis yang menggunakan teknik saduran. *Kedua*, menyusun karya tulis sebagai editor. Seorang editor hanya menyusun karya tulis orang lain, kemudian dibukukan dan diberi

kata pengantar seperlunya oleh editor. Buku seperti ini pun telah menjadi sebuah karya tulis si editor. Cara seperti ini, masih merupakan pendekatan yang mudah untuk membuat sebuah karya tulis. *Ketiga*, mengumpulkan data dari internet, kemudian dikonfilasi, di edit, disusun, dan disempurnakan. Melalui model seperti ini pun, seorang guru akan mampu menyusun sebuah karya ilmiah yang bermutu mengenai sebuah pokok bahasan. Selain langkah-langkah tersebut, masih ada cara lain yang lebih mudah untuk dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, tampak kemudahan-kemudahan yang ada di sekitar seorang guru. Bahkan hanya untuk sekedar menyusun karya tulis, para guru sesungguhnya sudah terbiasa dengan karya tulisnya selama ini. Bukankah guru sering membuat soal, mengapa pembuatan soal itu tidak disusun sebagai sebuah buku dengan judul “bank soal” ?, bukan para guru sering memberikan tugas, mengapa tugas-tugas itu tidak disusun sebagai sebuah bentuk portopolio ?, bukan guru sering menyuruh anak didik untuk ‘merangkum materi’, “nonton TV sebagai sumber pelajaran”, “membuat kliping sebagai sumber belajar dan media belajar”, mengapa semua hal ini tidak dijadikan sebagai karya ilmiah atau PTK para guru ?

Ketika penulis mencoba memberikan penjelasan seperti itu kepada beberapa teman yang selama ini masih merasakan “sulit” menghadapi tuntutan pembuatan PTK atau karya tulis sebagaimana yang ditetapkan dalam

portofolio sertifikasi, kemudian mereka meresponsnya dengan kalimat, “ternyata mudah, dan banyak hal yang dapat dilakukan oleh seorang guru”. Secara spontan dan kompak, kami pada waktu itu menyebutnya dengan kalimat, “memang mudah” oleh karena itu kenapa mesti melakukan manipulasi mengenai sesuatu hal ?

Namun demikian, ada satu hal lain, yang lebih nyata sebagai penghambat untuk melakukan hal-hal yang mudah ini, yaitu hadirnya rasa malas untuk memulai atau malas untuk mengerjakan. Penyakit ini, mirip dengan penyakit menghadapi skripsi atau TA di masa lalu. Bila jawaban ini yang menjadi alasan utama, maka sudah tentu wajar bila pemerintah meragukan profesionalisme seorang guru, apapun gelar akademik atau jabatan yang disandanginya, karena ternyata guru tidak terbiasa dengan budaya tulis dan lebih banyak dengan budaya ngomong.

Portopolio jadi Saksi

Seolah tidak ada artinya. Berbagai tulisan yang pernah dibuat, baik di media massa lokal, daerah maupun nasional, seolah hanya sekedar saksi yang membisu. Karena ternyata, tumpukkan karya, sekitar 40 artikel yang tersebar di berbagai media dan jurnal, kumpur dari beberapa tahun terakhir hampir tidak bermanfaat.

Secara pribadi, saya tidak merasa rugi. Karena karya itu, tetap akan menjadi saksi tentang diri ini. Hanya saja, secara administrasi kepegawaian, saya termasuk orang yang tidak beruntung. Orang lain, yang tidak memiliki portopolio sebanyak itu, dan atau malah tidak memiliki karya nyata sekalipun, ternyata bisa lulus portopolio, sedangkan saya sendiri –atau mungkin ada juga yang senasib, ternyata harus menjalani proses sertifikasi dengan PLPG ini.

Potretku Saat itu

Walau agak narsis atau naif, tetapi, saya rasa perlu untuk menjelaskan wajah diri ini di sini. Satu sisi, untuk menjelaskan mengenai kelayakan diri untuk mengikuti sertifikasi profesi, dan sekaligus juga ingin memberikan informasi kepada pihak terkait mengenai model sertifikasi kali ini.

Lima belas tahun lalu, tepatnya tahun 1997, alhamdulillah, saya bisa menuntaskan pendidikan di Perguruan Tinggi pendidikan, IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Bandung, yang kini beralih nama menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Bidang kajiannya pun, adalah pendidikan Geografi, persis dengan kepesertaanku saat ini, yaitu disertifikasi sebagai guru profesional dalam bidang kajian Geografi.

Sesungguhnya, sejak tahun itu, bahkan lebih lama lagi, profesi guru itu sudah menjadi kegiatan harian. Beberapa tahun sebelumnya, pernah menjadi guru honorer, seperti di SMA Nusantara 1, SMA Lepni, SMA Bina Dharma, SMP Bina Dharma, SMA PGRI 1 Kota Bandung dan SMK Informatika Bandung. Ini adalah beberapa sekolah swasta yang pernah tersinggahi sebagai tempat bekerja sebagai guru honorer.

Variasi mata ajar yang pernah diemban. Tetapi, diantara tempat menghonor itu, mata ajar geografi tetap menjadi acuan dan patokan utama, karena mata ajar itu sesuai dengan ijazah. Selain geografi, memang sempat mengampu mata ajar Sosiologi, Antropologi, PKn, atau pelajaran mengetik di SMK Informatika.

Tahun 2002, mendapatkan berkah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister Universitas Padjadjaran (UNPAD). Program yang diambil, yaitu Program Sosiologi-Antropologi. Agak lama menyelesaikan tugas belajar ini. Tahun 2007, baru usai dan meraih gelar akademik magister dalam bidang Sosiologi-Antropologi.

Dalam kurun yang cukup panjang, terhitung sejak kuliah di IKIP Bandung sampai 2012, karya tulisku memang terhitung tidak begitu banyak. Sewaktu pemberkasan kenaikan pangkat yang pertama, untuk mendapatkan golongan III-b dalam kepegawaian, terhitung ada 40 buah artikel kurang lebih, makalah di jurnal dan seminar baik nasional maupun internasional, kurang lebih ada 4 buah, dan buku cetak yang dipublikasikan ada 4 buah.

Selain itu, mengelola blog pribadi, dengan nama *momonsudarma.blogdetik.com*. semua itu, merupakan bagian penting dari potretku saat itu.

Bagi lingkungan Kementerian Agama, khususnya yang rajin membaca Media Pembinaan yang dikelola Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, setidaknya pernah tiga kali bertemu dengan tulisanku di media ini. Kemudian, bagi rekan-rekan di UPI, UNINUS, UNPAD, atau UM Malang setidaknya pernah satu kali menemukan tulisanku dalam jurnal kampus dimaksud.

Kemudian bagi mereka yang aktif di organisasi, walaupun tidak selamanya bisa bertemu, saya pun pernah aktif dalam sejumlah kegiatan organisasi profesi. Menjadi penggagas dan juga perintis lahirnya Asosiasi Pendidik Geografi Indonesia, yang embrionya dari alumni UPI Bandung. Aktif juga di Persatuan Guru Madrasah Provinsi Jawa Barat, dan juga sempat mengelola *Leadership Institute* dengan rekan-rekan lainnya. Di tahun 2000-an, menjadi pengurus Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Pendidikan Indonesia (LP3I), anggota di Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia (MP2I), dan pernah aktif di Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) ICMI Kota Bandung.

Saya tidak bermaksud menceritakan seluruh gambaran mengenai diri ini. Namun, sekedar menjelaskan posisi dan potret ini, dengan maksud untuk meyakinkan diri, bahwa di sertifikasi saat ini, adalah sebuah kewajiban dan bukan satu hal istimewa atau apalagi disebut sebagai

sebuah keberuntungan. Tanpa bermaksud mengingkari nikmat Allah Swt, tapi uraian ini hanya ingin menegaskan kepada pihak yang ragu, dan atau meragukan kemampuan saya dalam profesi guru ini. Karena, selepas mengikuti diklat PLPG Ini, masih ada pernyataan sumbang mengenai guru.

“guru itu tidak berkualitas, tetapi tunjangan sangat besar”. Ujarnya. Saya ingin katakan, mungkin benar, ada oknum guru yang kurang berkualitas, tetapi tidak semua guru tidak berkualitas. Sebagai contohnya, silahkan cermati, potret ku ini, dan silahkan timbang kelayakanku dalam mengikuti program PLPG kali ini.

Sebagai Pegawai Negeri Sipil baru mulai tahun 2005 akhir. Praktis tahun 2006, baru terjun ke lapangan sebagai guru geografi dengan status sebagai CPNS (atau PNS). Di samping itu pun, kegiatan sampingannya masih tetap berjalan. Alhamdulillah, masih bisa menjalani aktivitas mengajar di Stikes Aisyiyah Bandung dalam mata ajar Sosiologi Kesehatan, Stikom Bandung dalam mata ajar Dasar-Dasar Logika dan Digesting, serta di MA Manbaul Huda Bandung dalam mata ajar Geografi. Saat ini, tahun 2012, selama 10 hari, menjalani proses PLPG di Cibogo Lembang.

Pergi Langsing Pulang Gendut

Di pagi hari yang masih dingin, teman sekamar, Pak Udan, dari Madrasah As-Salam Kabupaten Bandung sudah mengajakku keluar dari kamar. “Ayo keluar..jangan di kamar terus..”, ungkapnya dengan penuh semangat.

Ini adalah bangun pagi pertama kami di Pusat Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Di pagi buta itu pula, kami sudah bangkit dan bersiap diri. Maklum, peserta PLPG. Isu sebelumnya, sudah tertanam persepsi, bahwa ini adalah diklat. Ini adalah menentukan masa depan. Jika tidak serius, banyak yang tidak lulus. Setiap orang harus sudah siap dan sigap menjalani PLPG. Persepsi seperti itu sudah lama tertanam, dan juga sudah di kenal oleh para guru calon peserta PLPG.

Tetapi, pagi itu ---atau setidaknya, sampai pagi itu, kami tidak merasakan apa yang dipersepsikan itu. Kami rilek, kami nyantai. Kami senang dan kami tenang. Berbagai hal yang semula dibayangkan menakutkan, sampai hari kedua ini, belum banyak dirasakan. Bahkan, dihari kedua itu dan dipagi buta itu, kami harus sudah bangkit untuk menjalani proses rutin harian, dan kebutuhan biologis kami semua.

“makan pagi”. Itulah yang kami dapatkan dari jadwal harian kami, untuk selama sepuluh hari itu. Di pagi itu, suasana pagi masih agak gelap, atau lebih tepatnya, masih redup. Maklum suasana alam Kota Lembang yang cenderung dingin, kabut dan suhu pun lebih cenderung beraura dingin, dan banyak merangsang untuk tidur

pulas lagi, tetapi, di pagi itu, dan atau sepagi itu, kami harus hadir di ruang makan.

Makan pagi. Makan siang. Makan sore. Itu kegiatan rutin kami dalam sepuluh hari itu. Dengan menu yang beragam, dan cukup dapat diterima oleh lidah dan perut para peserta PLPG, membuat kami merasa terjauhkan dari berbagai prasangka buruk, sebagaimana yang sebelumnya didapat.

Seperti biasa. Seluruh peserta, dari berbagai jurusan, antri mengelilingi meja makan. Kuliner di pagi hari, hari kedua ini, sebenarnya sangat sederhana, yaitu nasi goreng, dengan telur mata sapi, asinan ikan, kerupuk dan sambal. Makan sederhana. Tetapi, untuk pagi sedingin itu, dengan air teh panas, membuat alam kota Lembang terasa nikmat dijalani, dan suasana PLPG menjadi tetap menyenangkan.

Dalam suasana makan itulah, sahabat kami, mengatakan, “enak benar, PLPG ini” ujarnya, “PLPG. Pergi langsung pulang gendut”, tuturnya lagi. Pernyataan itu dikemukakan, seiring selaras dengan hadirnya sajian dan pelayanan panitia PLPG yang sangat-sangat diterima oleh para peserta. Bagi para peserta, menu makanan dan frekuensi makan yang tersajikan selama ini, dianggapnya memberikan peluang bagi para peserta PLPG untuk menambah bobot berat badannya sendiri.

Entah siapa yang memulai, namun kenyataan di lapangan menunjukkan ada beberapa anomali sosial dalam menafsirkan atau memperlakukan uji sertifikasi guru. Muncul dan berkembangnya anomali sosial ini menurut teori ekonomi bukan sesuatu yang mandiri. Sebuah permintaan akan muncul di kala penawaran sosial berkembang di masyarakat. Pertemuan antara nalar penawaran dan permintaan itulah yang kemudian mendorong berkembangnya anomali pemakaian terhadap agenda sertifikasi guru di Indonesia.

Ada satu kelompok yang menganggap uji sertifikasi sebagai bentuk ketidakpercayaan pada sistem penilaian kenaikan pangkat/golongan para tenaga pendidik. Sehingga dalam proses pemberkasan administrasi sertifikasi setiap peserta uji dituntut mengumpulkan berbagai surat tugas dan sertifikat-sertifikat kegiatan selama dirinya bertugas sebagai guru.

Ada pertanyaan sederhana terhadap model seperti ini. Mengapa para penguji tidak menggunakan angka kredit kepegawaian dari para peserta uji ? Sebagaimana dimaklumi bahwa setiap orang yang memiliki golongan/pangkat tertentu sudah memiliki kredit poin tertentu pula. Sebagai contoh, bila dia menduduki Pangkat/Golongan III-a, berarti dia setara dengan nilai 150-poin. Oleh karena itu, untuk mencapai angka 850 poin sebagaimana yang disyaratkan dalam uji sertifikasi

dia dituntut untuk mengumpulkan nilai sebanyak 700 poin lagi.

Pada kenyataannya setiap peserta uji diwajibkan untuk mengumpulkan kembali seluruh unsur ternilai dalam kenaikan pangkat, mulai dari SK, perangkat pembelajaran, Surat Tugas dalam berbagai aktivitas, dan sertifikat-sertifikat penghargaan.

Dengan diwajibkannya untuk mengumpulkan unsur ternilai tersebut, dapat ditafsirkan ada keinginan dari Pemerintah (penyelenggara uji sertifikasi guru) untuk melakukan *recheck* terhadap keobjektivan seseorang dalam mengurus kenaikan pangkat. Kebutuhan ini sudah tentu dalam rangka menunjukkan keobjektifan dalam proses penilaian kelayakan terhadap seseorang sebagai tenaga guru.

Menjadi Inspiring Teacher

Pembukaan materi ajar di Jurusan Geografi, diawali oleh Dr. Mamat Ruhimat dari UPI. Gaya tutur yang terbuka, bahkan cenderung kocak, beliau memaparkan pandangannya mengenai guru profesional. Di sela-sela kesibukannya, mengurus berbagai tugas pokok lainnya di lembaga UPI, dan juga di instansi lain, pemikiran-pemikirannya masih dapat

mudah disampaikan dan mencerahkan peserta diklat waktu itu.

Menurut informasinya, katanya sih bersumber dari sebuah hasil penelitian, Indonesia termasuk negara “paling berani”. Berani membuat UU Guru dan Dosen, termasuk di dalamnya mengenai kebijakan sertifikasi profesi yang diundangkan. Ini adalah keberanian luar biasa yang dimiliki Indonesia, dan tidak dimiliki oleh negara lain.

Walaupun, pada ujungnya, merujuk pada sebuah penelitian pula, kata instruktur ini, penelitian yang dilakukan oleh Mae Chu Chang, Kepala Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Bank Dunia di Indonesia, Asia Timur, dan Pasifik menyatakan, hasil sertifikasi guru tidak berdampak secara signifikan pada kinerja akademis untuk diteruskan kepada anak didiknya.⁴

Hasil riset ini, selain menjadi bagian dari autokritik bagi seorang tenaga pendidik, dan juga penyelenggara sertifikasi pendidikan, juga menjadi bahan pertimbangan lain bagi kelanjutan perbaikan kebijakan sertifikasi itu sendiri. Bahkan, karena adanya hasil riset itu juga lah, stabilitas kebijakan sertifikasi guru menjadi belum ajeg pula.

Pada sisi lain, dosen UPI yang pernah menjadi Pimpinan di Sekolah Alfa Centaury Kota Bandung ini, mengatakan bahwa

⁴ Lihat “Hasil Sertifikasi Tak Berdampak pada Kualitas Guru”, sumber <http://edukasi.kompas.com/read/2012/10/17/15174823/Hasil.Serti.fikasi.Tak.Berdampak.pada.Kualitas.Guru>

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru ini, sama dan serupa dengan mensarjanakan sarjana. Ini unik. Seolah paradoks, tetapi menjadi sebuah kenyataan. Aneh tapi nyata. Mensarjanakan sarjana. Memprofesikan guru yang sudah mengajar puluhan tahun.

Namun demikian, ada tiga catatan penting dari pemikiran instruktur awal PLPG Geografi yang dapat diabadikan dalam tulisan ini. *Pertama*, guru memiliki kewajiban untuk terus belajar. Hakikat guru yang aktif dan dinamis itu, adalah tiada pernah merasa bosan untuk belajar. Sumber belajar, bisa berasal dari apapun. Hal penting, apapun bisa dijadikan sumber belajar, dan belajar pada setiap saat. Seorang guru, tidak pernah berhenti untuk belajar.

Kedua, hakikat kewajiban guru atau tugas pokok guru itu adalah mensosialisasikan nilai. Seorang guru, tidak pernah bosan untuk mensosialisasikan nilai. Apapun kritik dari orang lain, termasuk dari Mae Chu Chang, kewajiban guru itu adalah mensosialisasikan nilai. Di dalamnya, ada banyak praktek atau pendekatan, mulai dari pelatihan, pengajaran, pendidikan, pembinaan, dan pembiasaan. Semua itu merupakan bagian penting dari upaya membangun guru profesional.

Terakhir, ide dan konsep dasar yang disampaikan instruktur yang satu ini, yaitu mengharapkan guru benar-benar menjadi *inspiring* bagi para peserta didiknya. Janganlah jadi guru yang membunuh hasrat belajar anak. Jangan menjadi guru yang membunuh karakter anak. Jangan menjadi guru yang menghambat perkembangan anak. Jadilah guru yang

memberikan inspirasi, dan memotivasi anak untuk bangkit dan bergairah dalam mencapai cita-citanya.

Yakini dan pahami, anak-anak yang ada dihadapan kita ini, bukanlah kader yang diperuntukkan untuk zaman sekarang, apalagi zaman masa lalu, seperti waktu kita belajar. Mereka itu adalah generai 2045. Generasi mendatang. Oleh karena itu, meminjam pandangan Imam Ali karamallahu wajhah, didiklah anak-anakmu dengan pendekatan yang berbeda denagn cara orangtuamu mendidikmu, karena dia dipersiapkan untuk menghadapi tantangan masa depan !

Minimnya Haki

Beruntung bertemu kembali dengan Muda Jurusan Pendidikan Geografi UPI. Tenaga pengajar yang pernah mengenyam pendidikan di Aachen – Jerman (1996), dengan bidang keahlian Konservasi Sumber Daya Air (hydrologi), memberikan pencerahan lain. Beliau adalah Dede Rohmat, yang menjadi guru besar sejak tahun 2009.

Inspirasi yang menantanginya, yaitu mengajak untuk mendefinisikan sesuatu secara lebih operasional. Sebuah definisi, termasuk definisi geografi sekalipun, hendaknya menjadi sebuah definisi yang memberikan tantangan bagi kita untuk bertindak praktis. Inilah, inti pesan yang tertangkap waktu itu.

Banyak diantara kita, membuat definisi yang tidak memiliki gairah, atau kurang mendorong untuk bertindak. Hal itu menunjukkan bahwa nilai praksis dari definisi atau pemahamannya sendiri pun menjadi lemah.

Ketidakpraktisan itu, akan berdampak panjang terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Khususnya dalam menetapkan prioritas kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Instruktur PLPG yang satu ini, secara tidak langsung menularkan kesadaran bahwa, *menggali barang tambang, hanya kita yang diuntungkan, tetapi mengkonservasi barang tambang dan menjadikanya sebagai objek wisata, maka banyak orang yang diuntungkan.*

Pemikiran-pemikiran ini unik dan menarik. Pernyataan itu memang tidak sederhana, dan tidak bisa disederhanakan. Bahkan, bisa jadi, pemikiran itu pun tidak sepi dari koreksian, tetapi, nilai moral yang diajukan, adalah kebutuhannya kita untuk menemukan strategi pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang memiliki nilai manfaat yang berjangka panjang.

Guru besar, yang memiliki tiga Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang sudah dipatenkan kepada Kemenkumham, memberikan dorongan kepada peserta PLPG untuk senantiasa melindungi kekayaan intelektual bangsa kita. “jangan biarkan ide cerdas kita hilang ditelan bumi, atau

terbang terbawa angin, atau hangus terbakar api, atau menguap terpanasi matahari. Guru atau dosen, sudah saatnya mempatenkan kekayaan intelektualnya. Karena jumlah HAKI itu adalah indikator dari peradaban sebuah bangsa”. Paparnya.

Provokasi Intelektual

Mungkin karena nalar akademik guru besar muda itulah, bahasa-bahasa provokatifnya masih terasa. Prof. Dr. Dede Rohmat, kali ini mengajukan pertanyaan, “benarkan Indonesia itu adalah tanah yang subur?”, kemudian, tidak berhenti di situ saja, dia pun mengajukan pertanyaan, “benarkah bahwa Indonesia itu adalah negeri yang kaya raya?”

Tanpa bermaksud menyalahkan, dia memberikan penjelasan kritisnya dihadapan peserta PLPG Geografi. “hati-hati dalam menggunakan kata-kata seperti tadi”, pesannya.

Indonesia di sebut sebagai negara yang subur, adalah pernyataan yang menggeneralisir. Karena, kita akan menemukan hamparan lahan kritis di berbagai pulau, termasuk di pulau Jawa. Ada tanah rawa atau tanah gambut, dan ada juga tanah kritis yang sudah mengalami degradasi kualitas lahan. Bahkan, dengan adanya bencana kebakaran hutan atau pembakaran hutan, sejumlah lahan di Indonesia sudah menjadi lahan

terbuka dan potensial melahirkan bencana alam. Ini adalah fakta terakhir. Dengan kata lain, pesannya pula, ‘berikan penjelasan kepada peserta didik, bahwa tanah yang subur di Indonesia itu, hanyalah sebagian lahan saja. Berikan penjelasan kepada peserta didik, bahwa sebagian lahan di Indonesia sudah mengalami penurunan kualitas.’ Tuturnya lagi.

Melalui penjelasan itu, jelas sudah bagi kita, bahwa paparan instruktur kali ini, merupakan pesan moral yang faktual kepada peserta didik mengenai kondisi lahan di Indonesia. Kemudian, beliau pun melanjutkan dengan pandangannya, bahwa kesadaran seperti inilah, yang disebutnya kesadaran praktis mengenai konsep geografi. Jadi geografi itu, harus tegas, jelas, dan faktual sehingga memiliki nilai praktis dalam merespon berbagai fenomena yang terjadi saat ini.

“Luar Biasa !” pikirku saat itu. Lama sudah tidak berdialog dengan beliau, wawasan dan kekritisannya tetap tajam, dan malah kian menukik terhadap hakikat geografi dan peran geografi serta peran pendidik geografi.

Kekritisan itupun, dia tunjukkan pula ketika membahas mengenai daerah-daerah perbatasan. “adakah pendidikan nasionalisme dari pelajaran geografi?” ajunya kepada peserta PLPG. Di saat, Indonesia mengalami kesulitan dalam penanganan daerah-daerah perbatasan, dimana posisi pendidikan geografi ?

Merenungkan pertanyaan dan menyimak penjelasannya mengenai berbagai problema pembangunan daerah perbatasan, saya merasakan kian mengerutlah posisi diri. Ternyata, peran guru geografi belum mampu secara optimal mengembangkan kesadaran ruang Indonesia, dan belum optimal dalam membangun nasionalisme Indonesia.

Memperhatikan hal seperti ini, akhirnya saya mengajukan pandangan, dan semoga Profesor kita ini, dapat mengabulkannya untuk membuat sebuah rujukan materi mengenai “GEOGRAFI REGIONAL KAWASAN PERBATASAN”.

Teori Keseimbangan Alam

Nalar provokatif Prof. Dede Rohmat tidak berhenti. Guru Besar yang tinggal di Majalaya – Bandung ini, memberikan penafsiran lain mengenai bencana alam. Walaupun saya kurang mendapatkan informasi lanjutannya, atau penjelasan detilnya, namun di kesempatan ini, saya ingin menyebutnya sebagai sebuah teori keseimbangan alam.

Bencana Alam, menurut guru besar yang berasal dari Majalaya ini, merupakan sebuah reaksi alamiah dari alam dalam melakukan kesetimbangannya kembali. Akibat ulang manusia, dan eksploitasi yang dilakukan oleh manusia secara berlebih itu, menyebabkan alam

tidak seimbang. Karena ketidakseimbangan itulah, kemudian alam melakukan koreksi terhadap kondisi faktual, dalam bentuk reaksi alamiahnya.

Reaksi alamiah yang dilakukan alam itu, merupakan reaksi alam terhadap kondisi dirinya. Reaksi alam itu, oleh kebanyakan manusia disebutnya sebagai bencana alam. Padahal, fenomena itu adalah fenomena alamiah yang dilakukan alam untuk membangun keseimbangannya sendiri.

Walaupun masih bingung, tetapi, ide ini benar-benar provokatif dan menantang diri untuk terus melakukan kajian lanjutan. Benarkah, teori keseimbangan ini ? benarkah bencana alam itu adalah sebuah reaksi alamiah dari alam untuk membangun keseimbangannya sendiri ?

Definisi Lahir Sesuai Zamananya

Tanpa sengaja, saya mendapatkan jawaban menarik dari uraian Prof. Enok Maryani yang memberikan materi pada tahap selanjutnya. Walaupun, ketua program IPS Pascasarjana UPI ini membawakan materi mengenai model pembelajaran, namun di awal tuturannya, beliau memberikan penjelasan bahwa “sebuah definisi lahir sesuai konstelasi zamananya”.

Penjelasan ini, langsung mengingatkan saja pada pekerjaan intelektual (PR) yang diajukan ahli konservasi SDA sebelumnya. Kemudian, saya sendiri pun, menyadari bahwa pemaknaan terhadap bencana alam, apapun maknanya, bisa terjadi (a) sesuai dengan pengalaman pendidikan yang dimilikinya, (b) perspektif keilmuan yang dikembangkannya, dan atau malah (c) konstelasi zamannya itu sendiri.

Dengan wawasan baru atau perspektif dunia yang baru, manusia dituntut untuk mengembangkan pemaknaan barua terhadap berbagai hal yang terjadi di dunia ini, termasuk gejala alam yang ada di sekitar kita.

Kesenangan Yang Tidak Menyenangkan

Di asrama penginapan, guru ekonomi menuturkan pengalamannya mengikuti PLPG. Instruktur yang hadir pada waktu itu, terbilang senior. Sudah bergelar Doktor, spesialisasi kajiannya adalah Pembelajaran Ekonomi, dan Ekonomi Makro. Materi yang diajarkan, sangat menarik, yaitu model pembelajaran yang menyenangkan.

Dari sisi materi, tidak ada satu orang peserta pun menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk. Materi yang disampaikan, sangat luas, dan kritis. Isinya pun menarik, yaitu model pembelajaran PAIKEM

(pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan).

Walaupun sudah cukup sering mendapatkan materi ini, dan mudah ditemukan diberbagai buku, tetapi, dengan wawasannya yang luas, dia mampu menyajikan materi yang tetap kritis terhadap materi PAIKEM itu sendiri.

Kendati demikian, mungkin, karena instruktur juga manusia, dan bukan manusia sempurna, tetap saja memiliki kelemahan. Kelemahan yang tampak, dan menjadi gunjingan peserta diklat sore itu, yaitu gaya mengajarnya itu lho.. yang kurang menarik.

“cara ngajar PAIKEM, tapi kok tidak menyenangkan...” ujar pak Asep yang membuka cerita pengalaman di sore itu. “beliau itu, pinter sendiri, dan asyik sendiri dengan wacana yang dikembangkannya...”tuturnya lagi. Penilaian seperti ini, ternyata tidak sendirian. Sejumlah teman yang lainnya pun, turut ambil bagian, untuk mendukung penuturan Pak Asep tersebut.

Mungkin itulah fenomena kita. Mengajar materi CBSA, malah dengan gaya yang Coba Bahasa Soal-Soal Aja ! di suruh mengembangkan KTSP malah menjadi Kurikulum Tanpa Standar Pasti atau Kurikulum Tergantung Si Pemakai. Bahkan, banyak kasusnya, guru mengajarkan ekonomi tidak efisien, guru bahasa Indonesia tidak berbahasa Indonesia, guru olahraga sering malas mengajar, guru geografi tidak tahu jalan utama sebuah kota, guru sejarah lupa masa lalu, dan sebagainya.

Kasus serupa, dialami pula oleh Pak Iwan, guru Kimia yang mengikuti PLPG beberapa tahun sebelumnya. Dalam amatnya, “ada instruktur yang mengajar andragogik, tetapi tidak andragogis”. Dia asyik sendiri dengan gayanya, dan caranya sendiri. Begitu pula dengan pesertanya, mereka asyik dengan kegiatannya masing-masing. Simpul sederhanya, guru yang tidak peka terhadap psikologi belajar, akan mengalami hal serupa ini.

Kejadian ini pun, terjadi pula pada sejumlah guru yang lainnya. Menyampai motivasi yang tidak menggairahkan, mengajarkan teknik inspiring yang tidak mencerahkan, mengajarkan cara belajar yang tidak mengajar, dan mengajarkan materi kesenangan yang tidak menyenangkan !

Antara Proses dan Hasil

Sore itu. Antri makanan dihari yang ketiga. Tidak seperti biasanya, antrian makan di sore ini agak menarik. Kemenarikannya itu, karena guru-guru dari jurusan Sejarah hadir berbarengan di meja makanan dengan jurusan geografi.

“hai, ladt first....lady first....” ujar seorang guru laki kepada teman-teman yang lainnya. Saya kurang paham, maksud dan tujuannya. Tetapi gerak-gerak amat kentara. Sambil menyubit teman guru laki yang lainnya,

mereka memandang seorang peserta PLPG dari teman sekelasnya, guru sejarah, yang tampak berhidung mancung, dan berwajah bening. Walaupun agak gemuk dikit, wajah guru sejarah ini tidak jauh beda dengan Nabil Syakib.

“ah..itu hanya imajinasi dari orang yang hobinya menggoda saja...” ujar kita saat itu. Sambil juga berebut piring untuk alas makan di sore itu.

Peserta PLPG sore itu, tumpuk dua kelas. Sehingga antrian cukup banyak. Hampir 60 peserta hadir untuk memperebutkan antrian makan di sore itu.

Tidak jauh berbeda dengan anak-anak kecil. Rebutan sendok, garpu, piring dan posisi antrian. Saya sendiri tak luput dari mainan itu. Sementara dua guru laki tadi yang sedang memperhatikan “bu Ai Nabila Syakib” pun terlibat dari ‘mainan rebutan makanan di sore itu”.

Banyak karakter yang ada saat itu. Seperti halnya, bu Ai dan sejumlah guru perempuan lainnya, lebih banyak mengambil posisi berdiam diri. Sambil senyam-senyum ke sana ke mari, mereka memperhatikan ulah rekan-rekan lainnya yang berebut makanan.

Ada juga yang mengambil cara lain. Dia langsung ambil piring, dan tidak berarti. Langsung dia ke penghujung seberang sana. Tidak antri dari awal, tetapi langsung mengambil posisi dipaling depan. Bila orang lain, berawal dari piring, nasi, lauk pauk, sampai ke air

kemasan. Orang yang satu ini, langsung ambil air kemasan. “lihat ini, pakai jalan cepat, saya sudah dapat makanan...”ujarnya, sambil mengacungkan air kemasan dan beberapa lauk pauk. Sementara nasinya belum dia dapatkan.

Sementara, saya dan sejumlah teman yang lainnya, tetapi mengikuti mekanisme yang prosedural. Antri, dan mengambil langkah dari awal, sampai pada akhir. Di sela-sela itulah, saya melihat ada fenomena unik. Tidak terasa dan tidak terkendalikan lagi, saya mengatakan, *“Mengutamakan hasil, maka apapun dapat dilakukan. Sedangkan orang yang mengutamakan proses maka apapun bisa didapatkan.”*

Pernyataan ini, ternyata mendapat tanggapan serius dari rekan-rekan yang lainnya. Di sela-sela menyantap konsumsi sore itu, mereka mengajukan pandangan mengenai pernyataan yang baru saja disampaikan.

Saya membayangkan, mengenai kebijakan aneh dari sejumlah guru dan kepala sekolah mengenai siasat jitu menghadapi UN. Saya membayangkan, mengenai ulah aneh dari sejumlah guru yang mengembangkan siasat jitu dalam meloloskan anak mengikuti program bidik misi. Saya membayangkan, mengenai ulah sejumlah oknum yang mengembangkan cara aneh dalam menghadapi portopolio sertifikasi guru. Dari sejumlah kasus itu, pernyataan bahwa *“Mengutamakan hasil, maka apapun dapat dilakukan”* kian menemukan kebenarannya.

Sementara mengingat kaus Chairul Tanjung, yang mampu menjalani proses usaha secara benar, atau sesuai dengan nilai dan etika bisnisnya, ternyata mampu meraih banyak hal. *“orang yang mengutamakan proses maka apapun bisa didapatkan.”*

Gara-gara Lampu, PLPG diperpanjang !

Berita bahagia, yang berbuah penderitaan. Itulah yang dirasakan banyak peserta. Mulanya, berita bahagia itu berawal dari adanya banyak acara yang tidak bisa ditinggalkan oleh beberapa instruktur Pendidikan dan Latihan Profesi Guru. sebenarnya, tidak terlalu parah, dan itu termasuk kategori wajar. Misalnya saja, seorang instruktur datang terlambat selama 10 – 15 menit. Atau, ada juga instruktur yang memang memangku jabatan structural di lingkungan akademiknya, di sela-sela memberikan pembelajaran kepada peserta PLPG, kerap kali menghentikan PBM karena ada telepon dari luar.

Alasan-alasan praktis dan klasik itu, ternyata berbuntut panjang. Para instruktur kerap kali mengajukan permohonan maafnya kepada para peserta PLPG, dan kemudian memberikan sejumlah konvensasi. Diantara konvensasi itu, yakni ada yang berupa tugas yang relative lebih mudah dan memudahkan, jadwal pembelajaran yang tidak kaku, gaya mengajar yang

lebih familiar, dan juga kadang-kadang, toleransi waktu pembelajaran lebih terbuka.

Hal lain yang cukup menguntungkan dan bahkan sangat menggembirakan yaitu adanya keputusan dari Panitia PLPG bahwa waktu penyelenggaraan PLPG dipercepat, dan insya Allah akan ditutup hari senin, atau hari kedelapan dari rencana PLPG selama sepuluh hari.

“hore...”, ujar Mas Mis, seorang guru madrasah dari sebuah Kabupaten tetangga Kota Bandung. Teriakan itu terlontar, dan bahkan perayaan kegembiraannya itu, ditunjukkan layaknya seorang bobotoh menyaksikan pemain idolanya memasukkan gol tunggal ke gawang lawan.

“Alhamdulillah....”, pekik sejumlah guru lainnya mendengar keputusan panitia tersebut. Perayaan kegembiraan itu, sangat cepat menyebar dan menerabas ke berbagai jurusan, hingga tak terkendalikan lagi. Suasana gemuruh dan pancaran kegembiraan dari wajah-wajah para peserta terpancar hingga mengalahkan pancaran sinar matahari yang tengah moncorong di siang hari itu.

Matahari pun tersipu-sipu. Alam pun meredup. Semua itu, terjadi karena, pancaran kebahagiaan dari wajah para peserta PLPG yang begitu kuat. Saking gembiranya. Sinar kebahagiaan itu menyeruak ke berbagai penjuru di dunia.

Berawal dari pertemuan antara ketua kelompok peserta PLPG dengan panitia. Malam itu, dibicarakan mengenai berbagai program yang terkait dengan agenda tiga hari mendatang. Berdasarkan jadwal, dua hari berikutnya adalah workshop, dengan model pembelajaran yaitu penugasan membuat silabus, RPP, bahan ajar dan PTK. Ternyata, berdasarkan pengakuan instruktur dan juga laporan ketua kelompok mata pelajaran, semua kelompok sudah mampu menuntaskan tugas-tugas tersebut.

Inti kata, menurut ketua kelompok, tugas yang sejatinya harus dikumpulkan dalam dua hari kedepan, sudah bisa dikumpulkan malam itu. Para instruktur pun mengakui, bahwa model penugasan yang dikembangkan waktu itu, potensial mempercepat kinerjanya dan tugas peserta didik.

Memang benar. Ada seorang guru perempuan, dari asrama sebelah, yang meraung-raung, menangis, akibat tugas yang numpuk. Di tengah malam buta, sekitar pukul 02.00 WIB, menurut tuturan teman sekamarnya, ibu itu menangis meraung-raung melihat dan menghadapi tugas yang begitu numpuk. Hingga harus mengorbankan jam tidur, dalam keadaan fisik yang lemas, dan mata yang sayup sekalipun, alhamdulillah, tugas itu bisa dituntaskan seperempat jam menjelang shalat subuh.

Itu adalah pengalaman peserta PLPG pekan ini. Pengalaman itu pun, tidak dirasakan oleh ibu guru dari kabupaten paling selatan di Jawa Barat. Tetapi, hampir

setiap peserta merasakannya juga. Hingga ada ucapan, stress, tertekan, atau galau, seolah menjadi kosa kata harian bagi para peserta PLPG kali ini. Hadiah dari kerja keras, atau kerja lelah itu, adalah sangat kentara, tugas yang sejatinya harus dilakukan dua hari kedepan, saat itu sudah bisa dituntaskan. Dengan alasan itulah, kemudian, panitia dan instruktur mengambil keputusan untuk mempercepat acara penutupan PLPG.

Diantara peserta yang tampak senang atau gembira buuuuuaanget itu, adalah Mas Mis dan Pak Udan.

Ah, entah mengapa. Itu pun mungkin hanya kebetulan. Di sebut kebetulan, karena hanya mereka berdua yang secara reaktif memberikan respon sumringah mendengar laporan ketua kelompok mata pelajaran menyampaikan hasil keputusan panitia tersebut.

Saya paham betul, bagaimana kedua sahabat kita ini mengerjakan tugas workshop PLPG kali ini. Merujuk pada jadwal, malam itu kami akan tengah menuntaskan tugas membuat PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Diberi keluangan waktu selama 150 menit, kami diwajibkan membuat proposal PTK. Tidak ada buku rujukan, selain bahan ajar. Tidak ada teman bicara, kecuali diri sendiri. Tidak ada tempat bertanya, karena setiap orang pun serius mengerjakan tugasnya masing-masing.

Jangankan satu buah proposal Penelitian, sekedar untuk membuat pendahuluannya pun, Mas Mis mengalami kesulitan luar biasa. Keringat panas dingin mulai

bercucuran. Bukan hanya beliau, saya pun, yang dipandang orang sudah terbiasa dengan tulis menulis, tidak terhindar dari kelelahan dan kucuran keringat. Tegang, bukan saja sulitnya menuliskan proposal PTK, tetapi, waktu yang terbatas itu jugalah yang membuat jantung ini berdebar.

Ketegangan demi ketegangan terus berlanjut. Walaupun pada dasarnya, ketegangan ini, mulai dirasakan sejak hari keempat PLPG. Sejak hari keempat hingga hari ketujuh kemarin, begitu padat dengan tugas yang berbuah karya nyata, seperti proposal PTK, Silabus, bahan ajar, dan RPP. Semua itu harus diselesaikan dalam bentuk tulisan tangan, dan dikumpulkan selepas jam diklat berakhir. Beberapa tugas yang dibawa ke rumah, diantara adalah membuat media pembelajaran atau menuntaskan pekerjaan yang belum terselesaikan.

Oleh karena itu, mendengar laporan bahwa PLPG akan dipercepat, dan akan ditutup hari senin atau hari kedelapan, membuat banyak peserta merasa sumringah. Alhamdulillah... kata sebagian orang.

Sayangnya, cerita dan berita itu belum berakhir. Karena, Pak Udan yang membawa berita itu, langsung berita itu, langsung berteriak kencang, “Gelo.....mimpi...” ketusnya, “ah, pak asepe, kenapa lampu dinyalakan, jadi we.....PLPG dilaksanakan tetap sesuai jadwal..” ketusnya.

Semua yang hadir, termasuk Pak Sugeng, langsung ngakak.....!!! Haha.haha...!

Sadar Diri

Perjalanan pendidikan dan pelatihan, kian mendekati hari-hari akhir. Di ruang kamar penginapan itulah, seperti biasa, Pak Asep dari Al-Jawami Kabupaten Bandung memberikan pertanyaan kritis kepada kami yang hadir.

“apa hikmah dari perjalanan PLPG, saat ini ?” ajunya kepada kami saat itu. Ajuan ini, biasanya dia sampaikan, selepas shalat isya, atau menjelang kami istirahat. Sehingga, gara-gara ajuan masalah itu jugalah, rekan seasrama di PLPG ini, terpancing untuk tidak tidur sore-sore dan terpaksa terlibat dalam wacana-wacana yang diajukannya.

Pertanyaan sederhana, tetapi memiliki jawaban yang tidak mudah dirumuskan. Kata orang pintar, jawabannya tidak sederhana, tetapi sangat kompleks. Kata orang yang tidak jenius, tetapi masih bisa berpikir, “gampang-gampang susah.....”. Sedangkan, bagi mereka yang tidak pernah mau berpikir, memberikan jawabannya yang polos, “ah itu mah relatif, pelajaran pentingnya sangat subjektif, bergantung pribadi masing-masing...”.

Memang betul. Agak susah untuk merunut jawaban tersebut. Saya sendiri, memang bukan bagian dari orang-orang tersebut. Saya tidak berani memosisikan diri sebagai orang pintar, atau orang yang tidak mau berpikir. Namun sekedar menimbrungi rembugan itu, dan atau meramalkan wacana, maka pada kesempatan dimaksud saya Saya menuturkan pengalaman pribadi saja.

Entah hasil refleksi atau pun sekedar keterkejutan pikiran saja. Dari perjalanan PLPG selama itu, saya merasakan ada 'momentum' yang kuat sehingga menghentakkan pikiran dan membangkitkan kesadaran diri.

Saya sadar. Tersadar. Atau disadarkan. Entah kata apa yang paling tepat. Dari perjalanan menjelang 10 hari itu, ada pikiran bahwa menjadi seorang guru profesional itu tidak mudah. Pekerjaan menjadi seorang guru profesional itu bukanlah pekerjaan sederhana. Terlebih jika kita masih tergantung pada materi atau finansial, maka profesionalitas itu menjadi sesuatu yang banyak dipertanyakan orang !?

Pada sisi lain, khususnya saat mengikuti pembekalan atau pengayaan materi ajar. Saya sadar, bahwa materi ajar yang harus disampaikan kepada peserta didik itu tidaklah sedikit. Saya sadar bahwa model pembelajaran yang perlu dilakukan dan dikembangkan itu tidaklah mudah.

Pada saat UKA (uji kompetensi awal) misalnya, pikiran dan perasaan ini masih juga dapat terkaget-kaget. Karena ternyata materi ajar yang perlu disampaikan itu, masih banyak yang harus dimatangkan dan dipelajari kembali. Kemudian di sepanjang perjalanan PLPG ini, model pembelajaran, materi ajar, dinamika ilmu pengetahuan serta dinamika pelayanan pendidikan di luar tempat kerja sendiri, begitu sangat tinggi.

Semula, saya sudah merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki. Malam itu, seluruh kemampuan yang sudah ada selama ini, ternyata belum cukup untuk menjadi bekal seorang guru profesional. Selama ini, sudah merasa bangga dengan satuan pendidikan tempat kerja sendiri, ternyata masih banyak lembaga pendidikan di luar diri kita sudah maju sangat pesat.

Semula, saya merasa sudah mampu memberikan pelayanan pendidikan yang prima kepada anak didik. Dalam sepuluh hari itu pula, saya tersadarkan, bahwa kualitas pelayanan minimal yang diberikan itu, ternyata masih-masing sangat minimal, dan belum memberikan bentuk pelayanan yang optimal.

Entah kebetulan atau tidak, alam bawah sadarku waktu itu, seolah menuntun ke rekan-rekan yang berlatar belakang pendidikan sejarah. Pikiran ini, seolah ingin mengatakan, itulah hakaikat utama dari pelajaran sejarah. Melalui mata pelajaran sejarah, kita diajak untuk membangun kesadaran sejarah kita mengenai diri kita.

Kenali masalah, dan evaluasi masa lalu, kemudian timbanglah dengan tantangan kita masa kini dan masa depan, akankah kita masih mampu untuk bersikap sombong dalam hidup ini ?! Melalui “kesadaran sejarah”, kita diajak untuk sadar diri, mengenai kualitas diri dan kemampuan kita yang asli. Melalui kesadaran sejarah inilah, kita diajak berrefleksi atau merefleksikan mengenai berbagai hal yang pernah terjadi, atau pernah dilakukan tempo hari.

Sadar Posisi

Bila dalam kesempatan sebelumnya, saya mendapatkan pelajaran penting dari pelajaran sejarah, dibagian ini, saya merasakan ada hakikat geografi yang membantu penyadaran ini. Hakikat sejarah adalah membangun kesadaran diri kita, sedangkan hakikat geografi membangun kesadaran posisi atau lokasi.

Dari satu kelas, sebanyak 30 peserta, hanya enam orang yang berasal dari jurusan pendidikan geografi. Peserta lainnya, ada yang berlatar belakang pendidikan agama Islam, sejarah, ilmu pertanian, administrasi niaga, hukum, bahasa inggris, dan jurusan-jurusan lainnya, termasuk jurusan perbandingan agama. Sangat beragam.

Keragaman latar belakang itu, bukan saja, terjadi di kelompok geografi. Di kelompok guru sejarah, ekonomi, dan sosiologi serta keterampilan pun, begitu adanya.

Banyak yang mismach, katanya. Atau istilah yang populer waktu itu, disebutnya banyak guru yang *mualaf*.

Tetapi, teman-teman geografi memberikan keterangan bahwa, hakikat belajar geografi itu adalah mempelajari lokasi atau tempat. Kesadaran akan tempat itulah, kesadaran yang menjadi penekanan penting dalam pelajaran geografi.

Melalui penjelasan itu, sekali lagi, saya tersentak. Tersentak, karena inilah yang hilang dari kesadaran banyak manusia saat ini. Banyak orang yang berlaku, bertindak, berbuat sesuatu, tetapi, dia lupa akan tempat atau posisinya masing-masing.

Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengatakan, apapun latar belakang kita, dari manapun jurusan kita sebelumnya, dan apapun pekerjaan kita masa lalu, tetapi, melalui PLPG ini, kita diajak untuk bersikap tegas, bahwa 'profesionalitas mata pelajaran saat ini' adalah tempat kita yang baru, dan posisi kita masa kini juga masa depan !

Tidak ada tawar menawar lagi. Apapun latar belakang kita, tetapi posisi kita saat ini, adalah guru profesional mata pelajaran yang tertera pada piagam sertifikasi itu. Itulah kesadaran yang harus dimunculkan, dan itulah kesadaran posisi. Karena kesadaran itulah, saya berucap syukur, dan berterima kasih kepada rekan-rekan geografi, yang sudah membagi kesadaran hidupnya, dalam aspek kesadaran posisi.

Sekedar refleksi. Kita melihat banyak kasus. Pejabat negara kita saat ini, tidak jarang yang menunjukkan laku-lampah yang tidak mencerminkan posisinya. Mengaku sebagai wakil rakyat, tetapi melakukan tindakan yang tidak mencerminkan posisinya sebagai wakil rakyat. Orang seperti itu, saya sebutnya, orang yang tidak sadar posisi.

Betul. Wakil rakyat itu, berasal dari sebuah partai, dari satu daerah tertentu. Tetapi, ketika dia sudah manggung di lembaga nasional, sejatinya dia harus memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, dan bukan kepentingan pribadi dan golongan. Elit politik yang kerap menunjukkan sikap mendahulukan kepentingan diri dan golongannya, adalah elit politik yang tidak sadar akan posisinya, yaitu wakil rakyat dan pemimpin negara.

Melalui kesadaran inilah, saya tidak bermaksud untuk melupakan sejarah pendidikan kita di masa lalu. Itu adalah sebuah kesadaran lain, yang saya sebut sebagai kesadaran diri, tetapi melalui PLPG ini, dan atau melalui sertifikasi ini, kita diajak untuk meneguhkan diri, dan menegaskan diri dengan posisi kita yang baru.

Pertama, kita dituntut sadar posisi, bahwa dengan sertifikat profesi kita, sudah menduduki posisi jabatan profesional. Apapun kondisi kita, kita dituntut untuk bisa memaksimalkan ikhtiarkan kita dalam membangun profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Kedua, apapun latar belakang pendidikan kita di masa lalu, dan bagaimanapun kualitas kita di masa lalu, maka melalui sertifikasi profesi ini, kita sudah diikat dengan posisi baru, yaitu jabatan profesional sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat tersebut. Hal ini, saya sampaikan, sebagai bentuk penegasan, bagi teman-teman yang lain, yang memang sempat dianggap sebagai mualaf atau pendatang baru dalam lingkungan bidang studi tertentu.

Mualaf dan Nu Kalap

Istilah mualaf, merupakan salah satu kosa kata yang muncul dan ramai digunakan instruktur PLPG kali ini. Mungkin jadi, di kesempatan lain pun, istilah ini pernah muncul dan dimunculkannya juga. Hal itu, sangat terasa dan tampak, dari sejumlah instruktur yang mengisi di ruangan kami, kerap menggunakan istilah *mualaf* dalam sela-sela pembicaraannya.

“Ahmad...?” ucap seorang instruktur. “hadir”, jawab seorang guru laki yang duduk di barisan kedua, kursi barisan putra. “latar belakang pendidikan sebelumnya, apa ?” tanyanya ulang.

Mendengar pertanyaan itu, setiap peserta kerap merasa deg-degan. Karena pertanyaan itu, akan berujung pada komentar khas dalam PLPG ini. “Administrasi Niaga Universitas Indonesia”, jawab

Ahmad, yang kini mengajar pada sebuah madrasah di Kabupaten Kuningan.

“mualaf....lagi”, kata instruktur. Istilah mualaf ini, bukan sekali. Bukan mata diklat kali ini saja. Setiap instruktur baru yang hadir di ruangan ini, senantiasa melakukan pengecekan kehadiran dan melakukan pengenalan, dengan mengecek latar belakang pendidikan para peserta DIKLAT.

Kelompok kami adalah kelompok guru geografi. Instrukturnya pun adalah dari Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Dengan alasan itu, maka setiap instruktur seolah terpancing untuk melakukan pengecekan terhadap para peserta diklat. Atau mungkin, itulah gaya seorang guru yang benar. Sebelum memulai pembelajaran, seorang guru dituntut untuk mengecek kehadiran peserta, dan sekaligus melakukan pengenalan, dengan harapan dapat memberikan pembelajaran yang tepat dan bermanfaat.

“ini perlu dilakukan..” ujar seorang instruktur muda belia yang masuk di hari keempat Diklat. “karena kami, harus mengukur pengetahuan awal kegeografian dari peserta diklat...” paparnya, memberikan alasan kepada peserta diklat. Dalam penjelasannya selanjutnya, dikatakan bahwa, dengan memahami latar belakang pendidikan peserta didik ini, sudah tentu kami tidak akan memberikan pendalaman materi yang dianggap terlalu jauh, layaknya memberikan pendalaman kepada guru

yang sudah terbiasa dengan pelajaran geografi. Teturnya lagi.

Mudah dipahami, dan juga sangat dimaklumi. Bagi kami, sebagai seorang peserta diklat, amat sangat memahami, mengapa seorang guru melakukan pengecekan kehadiran, dan melakukan pendalaman mengenai latar belakang pendidikan peserta diklat. Meminjam istilah RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran), tindakan itu sama dengan *appersepsi*. Membahas kajian yang akan disampaikan dengan memperhatikan pengalaman atau pengetahuan peserta didik sebelumnya.

Namun demikian, hal yang kerap menjadi ganjalan itu, yaitu penggunaan istilah *mualaf*. Konsep mualaf, adalah konsep yang biasa digunakan oleh umat Islam, untuk menyebut orang yang baru masuk Islam. Dengan kata lain, istilah mualaf ini, digunakan untuk orang-orang yang mengajar geografi, tetapi latar belakang bukan jurusan geografi. Mualaf digunakan untuk menunjuk seorang peserta PLPG pada mata pelajaran tertentu, yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kepesertaannya.

Bagi kita yang dilapangan, pada dasarnya, tidak mau menjadi mualaf. Bahkan, menurut seorang peserta Diklat dari Subang, yang kini mengikuti kegiatan PLPG mata pelajaran Ekonomi, orang seperti saya ini, bukan mualaf, tetapi *nu kalap*. “kami tidak mau jadi mualaf, tetapi kondisi memaksa harus begini....” akunya.

Dalam bahasa Sunda, istilah '*nu kalap*' mengandung arti orang yang sedang terdesak, terpaksa atau kalang kabut. Sikap yang diambilnya, sudah bukanlah pilihan rasional, tetapi pilihan keterpaksaan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. "kami ini honorer, bila tidak mengambil mata pelajaran ini, kami tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program sertifikasi..." paparnya.

Iya, benar. Pilihan mata pelajaran sertifikasi ini, kadang memang bukan pilihan nurani. Pilihan ini jatuh, karena memang tidak ada pilihan lain, dan atau karena belum ada orang yang mewakili pelajaran tersebut. Maka, diambilnyalah kesempatan itu.

Di lapangannya saat ini, bukannya tuntutan mengajar 24 jam seminggu pun, menyebabkan guru banyak yang *kalap* (kelabakan) ? akibat dari minimnya ruang untuk mendapatkan jam tambahan pada pelajaran yang sejenis, banyak guru memberanikan diri mengampu mata pelajaran yang tidak serumpun dengan ijazah atau sertifikat profesinya.

Pikiran yang ada dalam benaknya, "Yang penting ikutan sertifikasi?!", atau "yang penting bisa cair ?!"

Sadar Orientasi

Di bagian awal, saya memaparkan inspirasi dari teman-teman sejarah. Dari guru-guru sejarah, saya mendapatkan inspirasi mengenai pentingnya sadar sejarah diri, atau sadar diri. Saya dulu memang begitu. Itulah yang disebut sadar diri, dan itulah pelajaran yang didapat dari guru-guru sejarah.

Sementara, bergaul dengan rekan seprofesi, yaitu guru-guru geografi, yang memfokuskan mengenai kajian lokasi dan tempat di muka bumi, saya tersadarkan mengenai sadar posisi. Sadar di mana tempat diri, di mana posisi diri. Termasuk saat ini. Melalui PLPG ini, saya disadarkan mengenai posisi sejati profesionalisme saya saat ini. Apapun hasrat dan mimpi saya saat ini, posisi profesionalisme saya saat ini, adalah pendidik geografi. Itulah sadar posisi.

Perbandingan antara sadar diri dan sadar posisi itulah, kemudian mengantarkan saya untuk sampai pada tahapan selanjutnya, yaitu sadar strategi mengenai apa yang harus diperbaiki.

Orientasi hidup saat ini, adalah memperkuat posisi atau memperkuat profesionalisme. Itu adalah kebutuhan mendesak, sesuai dengan apa yang diterima saat ini. Saya tidak mau, menjadi orang yang mengajarkan kesenangan dengan tidak menyenangkan, mengajar geografi dengan tidak berlaku geografik. Kritikan atau analisis yang sudah disampaikan dalam tulisan sebelumnya, akan tetap dijadikan sebagai acuan dalam membimbing diri ke masa depan.



Begitu pula dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Ketahuilah, bahwa untuk menggapai

impian di masa depan itu, dibutuhkan tiga langkah baku, yaitu sadar diri, sadar posisi, dan sadar orientasi. Dengan mendekatkan ketiga nilai kesadaran itu, kita dituntut untuk menunjukkan langkah strategis untuk mewujudkan impian kita sendiri.

Sekedar refleksi, ada orang yang memiliki cita-cita tinggi. Tetapi, dia tidak sadar diri. Dia tidak mengukur kemampuan diri. Dia membayangkan, bahwa apa yang didapat orang lain, merasa wajib dimilikinya pula. Padahal, kemampuan orang itu berbeda-beda. Bukan tidak boleh memiliki impian yang tinggi, tetapi kealpaan pada pemahaman potensi diri, akan menjadi awal dari penyesalan diri. Kegagalan manusia, kadang bukan disebabkan karena cita-cita itu sulit dicapai, tetapi lebih disebabkan karena kita gagal memahami potensi atau kemampuan diri sendiri.

Di lain pihak, ada juga orang yang tidak sadar posisi. Orang yang merasa sudah sukses adalah orang yang gagal. Orang hina itu adalah orang yang merasa sudah mulia. Orang yang sudah merasa pintar, adalah ciri dari

dari kebodohan. Orang yang merasa sangat kuat, adalah orang yang paling lemah. Orang-orang yang sudah merasa mencapai puncak, adalah orang yang ada di lembah. Semua itu adalah ciri dari kelemahan diri, dalam memahami posisi. Dia tidak sadar terhadap posisi perkembangan dan kemajuan dirinya.

PLPG adalah....

Entah apa alasannya, di akhir kegiatan pendidikan dan latihan profesi guru ini, saya diberi kesempatan untuk memberikan sambutan. Sambutan kesan dan pesan dari peserta di acara penutupan. Dadakan. Bahkan cenderung improvisasi. Itulah kata orang kampus atau akademisi.

Walaupun kesempatan ini baik untuk dimanfaatkan untuk curhat mengenai pesan dan kesan selama PLPG, namun suasana bathin para peserta sudah tidak mendukung lagi. Jasadnya masih di ruang penutupan, tetapi bathin, hati, dan pikirannya sudah pada mudik duluan.

Maklum, kata pa Asep, guru dari Kabupaten Bandung mengatakan, "sono ka budak, jeung aya niat balas dendam ka indung budak". Ruh peserta itulah, yang begitu kuat, baik dalam kelopak mata, maupun yang ada dalam pancaran wajahnya. Hingga, tidak aneh bila ada seseorang yang tengah memberikan pengarahan

dengan agak berlama-lama, suara gemuruh dan gerutu bermunculan.

“seperti anak kecil” ujar seseorang yang duduk sebelah kananku. “tidak jauh beda dengan para siswa di sekolah...”timpalan yang lainnya.

Sekitar 120 peserta, yang tersebar di lima jurusan, yaitu sejarah, geografi, sosiologi dan keterampilan serta ekonomi, sudah berdukk rapi di kursi masing-masing. Suasana ini, sudah pernah mereka rasakan. Suasana tempat duduk dan ruangan ini, pernah mereka rasakan, yaitu sewaktu mengikuti acara pembukaan PLPG tempo hari. Hari ini terulang lagi, dalam suasana yang berbeda, yaitu acara penutupan.

Sekitar lima kursi berbaris, terisi oleh sejumlah peserta dari sebuah jurusan. Setiap jurusan, mengambil posisi lima baris ke bagian belakang. Sehingga, setiap jurusan memiliki perwakilannya yang duduk di bagian depan. Sementara saya sendiri, sebagian kursi di bagian belakang. Bila tidak salah hitung, tiga baris paling belakang.

Dalam suasana seperti itulah, saya berjalan tampil menuju ke muka. Menuju podium, sambil melambatkan ID Card yang sudah sepuluh hari menggelayut di leher ini. Siang ini. Sekitar pukul 11.00 waktu setempat, ID Card itu tercerabut, dan status kepesertaan pun otomatis lepas. Tepuk tangan dari sejumlah teman satu jurusan sangat terdengar, seolah menyambut kedatangan (maaf rasa

narsis) seorang pimpinan partainya. “Ayo..ayo...master geografi...” ujarnya. Mendengar dan melihat gerak laku teman-teman seperti itu, saya hanya tersenyum. Saya tahu, ucapan dan pekikan itu, bukan bermaksud memuji atau menyanjungnya, tetapi sekedar penguatan saja, supaya sambutan pesan dan kesannya tidak terlalu panjang. Itulah yang saya tangkap !

Di mimbar itulah, saya menyampaikan beberapa kesan. Kalimat pertama yang terluncur dari lisannya, yaitu PLPG adalah *perginya lesu, pulanginya gairah*. Hal itu, saya kemukakan, karena sebelum pergi PLPG, kerap kali muncul isu yang sangat menakutkan. PLPG itu katanya, melelahkan. PLPG itu katanya menakutkan. PLPG itu sangat memberatkan. Dan isu lainnya. Sepuluh hari di kamp, dalam sebuah binaan, dengan maksud untuk memproses seorang guru menjadi seorang pejabat profesional. Tetapi, selepas PLPG, menjelang pulang, kegairahan itu muncul dan memuncak. Entah gairah apa ?

PLPG adalah *pami lulus, pasti gumbira*. Setiap peserta yang hadir di ruangan itu, atau sesiapaapun kita, bila mengikuti proses seleksi, maka harapan utamanya itu adalah bisa lulus. Lulus dari jaringan, lulus dari saringan. Seperti itu jugalah, kami, yang hadir di ruangan itu.

Dengan dua pesan itulah, yang kemudian ditutup dengan celetukan yang lainnya, PLPG, *pergi langsing pulang gemuk atau gendut ?*

Sewaktu mendapat surat tugas PLPG, pikiran ini langsung teringat pada tulisan sendiri di blog (gurumadrasahkotabdg.blogspot.com) yang bertemakan “sertifikasi profesi mazhab diklat”.⁵ Menatap, membaca, dan menelaah tulisan itu, yang ditulis tahun 2008, yakni sewaktu PLPG gelombang pertama dilakukan, saya tersenyum sendiri. Berbagai kelemahan penyelenggaraan sertifikasi profesi pada waktu itu, tampak jelas, sehingga secara pribadi saya bersikukuh untuk berpandangan pentingnya sertifikasi mazhab diklat. Ternyata, ucapan itu termakan sudah hari ini. Saya harus menjalani prosesi PLPG, selama sepuluh hari.

Ludah itu termakan sendiri. Itulah pepatah yang cocok dengan apa yang terjadi saat itu. Awal mulanya, menulis opini “sertifikasi mazhab diklat”, lebih sekedar sebuah upaya kritis dan komparasi terhadap proses sertifikasi guru pada waktu. Karena, secara pribadi, saya sendiri, merasa sanggup dengan benar, menjalani prosesi sertifikasi profesi dengan menggunakan portofolio. Betapa tidak ? perhatikan kembali profilku, sebagaimana yang pernah ditulis sebelum paparan ini. Namun, sejarah menunjukkan dan mengharuskan peristiwa ini terjadi saat ini. Saya, tahun ini, adalah peserta PLPG yang diselenggarakan UPI Bandung.

⁵ Lihat “Sertifikasi Profesi Mazhab Diklat”, dalam <http://gurumadrasahkotabdg.blogspot.com/2008/03/sertifikasi-profesi-mazhab-diklat.html>

Di masa lalu, khususnya pada gelombang 1 dan 2, menjadi peserta PLPG itu terasa minder, malu atau memalukan. Karena, menjadi peserta PLPG menjadi ciri bahwa portopolionya tidak lulus, dan layak di diklat. Tak jarang, orang yang di PLPG itu merasa depresi. Seperti yang teralami oleh seorang guru perempuan, dari mata pelajaran matematika, yang stress dan bahkan depresi menghadapi kenyataan itu. Sikap itu tampak dalam bentuk perilaku hariannya. Selepas ketidak luluhan portopolionya, sampai pulang dari diklat, sikap emosional senantiasa muncul dalam dirinya.

Suatu saat, beliau mendapatkan amanah untuk menjadi panitia UAS (Ujian Akhir Semester). Mendapat tawaran seperti itu, dengan tegas, dia malah menjawab, “gak ah, saya mah belum profesional., silahkan aja, oleh guru yang lulus portopolio” ketusnya, sambil berdiri beranjak dari kursi dan langsung pulang meninggalkan madrasah. Semua yang hadir, termasuk saya pun, bengong dibuatnya.

Di awal program, guru yang terdaftar sebagai peserta PLPG, kerap merasa kurang prestisius dibandingkan dengan lulus portopolio. Bahkan, karena alasan seperti itu jugalah, kemudian saya membuat opini pembandingan, bahwa sertifikasi mazhab diklat itu jauh lebih baik dibandingkan dengan portopolio saat itu.

Proses sertifikasi guru memang terus berkembang. Berbagai kelemahan sebelumnya, termasuk masalah portopolio terus diperbaiki. Termasuk di dalamnya,

melakukan perbaikan mengenai mekanisme dan praktek penyelenggaraan diklat profesi guru.

Ada banyak hal yang membedakan antara PLPG hari ini, dengan PLPG sebelumnya. Setidaknya, saya menemukan ada 5 (lima) titik tersulit bagi seorang guru yang mengikuti prosesi sertifikasi kali ini (2012).

Pertama, model *portopolio* adalah model termudah. Dengan mengumpulkan SK atau sertifikat kegiatan, dari berbagai tahun untuk mendapatkan nilai minimal 850 point. Jangankan yang sudah bermasa kerja lebih dari 6 tahun, saya saja, yang baru bermasa kerja 5 tahun, sudah mampu mengumpulkan point sebesar 800-an. Kemudahan seperti ini, tidak bisa dinikmati oleh mereka yang PLPG di tahun 2012. Mereka, terpaksa harus menerima posisi “*dianggap tidak memiliki portopolio*”, atau “*portopolio keprofesionalannya tidak diperhitungkan*” dan langsung dinyatakan harus mengikuti diklat profesi. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, peserta diklat itu adalah guru yang dinyatakan tidak lulus portopolio.

Kedua, dalam satu periode, peserta sertifikasi dari Madrasah negeri senantiasa mendapatkan kuota yang jauh lebih banyak, dan senantiasa ada di setiap tahunnya. Di madrasah yang kami tinggali saat itu, selepas dua gelombang awal, kuota kadang hanya 2 atau tiga orang. Hal ini memberikan dampak, semakin panjangnya *waiting list* (daftar tunggu) peserta diklat di Madrasah ini.

Curahan yang memprihatinkan, ada rekan seprofesi yang jauh lebih senior lagi, sampai tahun 2012 ini, belum juga terpanggil untuk mengikuti Ujian Kompetensi Awal (UKA). Banyak hal yang membuatnya terganjal, salah satu diantaranya adalah kuota antara PNS dengan non PNS. Akibat ada kuota ini, posisi daftar tunggunya malah kian merosot, dan tergantikan oleh guru non PNS yang sudah memiliki masa kerja dan usia lebih tinggi daripadanya.

Ketiga, peraturan kepesertaan sertifikasi berubah. Melalui keputusannya, Pemerintah menetapkan bahwa guru yang berhak sertifikasi itu adalah mereka yang sudah memiliki masa kerja lebih dari 6 tahun. Perubahan peraturan itu, menyebabkan posisi daftar tunggu ini semakin merosot kembali. Entah ke nomor berapa ?

Peraturan ini menyulitkan saya sendiri. Mengapa demikian, karena di awal tahun, saya tahu persis, ada seorang honorer, baru bertugas 1 tahun, (catat :HONORER baru Satu Tahun Kerja), tetapi sudah disertifikasi, sementara saya sendiri, pegawai negeri sudah lima tahun belum disertifikasi.

Dari pola seperti ini, jelas melahirkan fenomena hadirnya guru PNS di sekolah negeri yang belum profesional secara formal (belum disertifikasi), sedangkan guru non PNS di sekolah swasta sudah dinyatakan profesional secara formal.

Keempat, di tahun 2010, muncul lagi pernyataan atau peraturan, bahwa pada kuota 2011 dan selanjutnya,

tidak akan ada sertifikasi berbasis portofolio. Andapun ada, itu pun hanya 1 % dari kuota yang tersedia. Harapan untuk memanfaatkan portopolio sebagai modal sertifikasi gugur sudah. Hapus sudah. Satu-satunya harapan, yaitu menjadi peserta PLPG. Itu saja. Titik.

Terakhir, hal yang paling mengerikan, informasi yang didapat di forum acara Pembukaan dan Penutupan PLPG kali ini, peserta yang ikut PLPG, tidaklah menjadi peserta yang “otomatis” dinyatakan lulus. Berbeda dengan peserta tahun 2009-2010. Peserta PLPG tahun 2011-2012, peserta PLPG harus bekerja keras untuk mendapatkan kelulusannya.

Seperti yang terjadi pada guru-guru di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, saat itu, saat saya menjalani prosesi penutupan PLPG, mereka tengah melakukan demonstrasi di Universitas Pendidikan Indonesia, terkait banyaknya ketidaklulusan para peserta PLPG.

Posisi yang terakhir ini, adalah posisi tersulit yang dialami peserta diklat kali ini. Saya membayangkan, menjadi peserta sertifikasi gelombang pertama, begitu mudah dan dimanjakan, jangankan data yang benar, data yang palsu pun, tetap saja lolos dan lulus sertifikasi profesi. Kini mereka tengah tidur nyenyak menikmati tunjangan profesi. Sementara, saya saat ini, harus bekerja keras untuk mendapatkan status kelulusan sebagai peserta diklat.

Kendati demikian, saya masih bisa tersenyum. Karang terjal yang kuhadapi relatif tidak terlalu sulit, bila dibandingkan dengan mereka yang akan sertifikasi profesi di masa-masa yang akan datang. Bagi guru-guru yang belum disertifikasi, dan menjadi pendaftar tunggu untuk tahun 2013 atau berikutnya, akan menghadapi tantangan yang jauh lebih sulit lagi. Saya masih beruntung, hanya PLPG selama 10 hari. Mereka bukan mengikuti diklat selama 10 hari, tetapi mengikuti program PPG (Pendidikan Profesi Guru) selama 1 Tahun. Selain itu, untuk guru yang lulus PLPG pada tahun-tahun terakhir ini, tunjanganpun ada yang belum cair.

Hah !

Sebelum di Tutup

Sebelum menutup tulisan ini, saya tertarik dengan ungkapan teman-teman yang memiliki tingkat kesalehan tinggi. Adalah Ustadz Syafiq Abrori, yang mampu menunjukkan laku saleh di tengah kesibukan kami dalam menjalani tugas sebagai peserta PLPG.

Saya iri. Di saat kami merasa kesulitan untuk melaksanakan shalat berjamaah, beliau masih juga sempat berjamaah. Di lokasi PLPG ini, tidak tersedia masjid yang representatif, bagi peserta PLPG yang berjumlah 120 orang. Ada musholla, tetapi hanya cukup

untuk 5 – 8 orang. Karena itu, kebanyakan peserta PLPG menunaikan ibadah shalat di kamar masing-masing.

Sementara itu, Ustadz Syafiq, kepala madrasah swasta, yang memiliki latar belakang ilmu Pertanian ini, dan kini menjadi peserta PLPG Geografi, mampu menunjukkan konsistensi dalam ibadah di masjid. Beliau tetap, menjalankan shalat berjamaah, di masjid yang berlokasi di luar kegiatan PLPG.

Kesalehan laku, tidak sekedar ditunjukkan dalam ibadah kepada Allah Swt. Kesalehan laku pun, ditunjukkan pula dalam mengartikan rejeki atau kekayaan. Lulus PLPG adalah sebuah nikmat, tetapi untuk mendapatkan nikmat tidak perlu dengan cara maksiat. Itulah, kira-kira pesan yang disampaikan teman-teman yang hadir dalam obrolan di antara guru Geografi saat itu.

Pernyataan ini, mengingatkan saya, pada kelakaranku di masa lalu. Mungkin kelakaran tahun 2007an. Waktu itu, saya mengatakan, “PLPG itu adalah upaya menghalalkan tunjangan profesi”, tegasku. Pandangan ini saya kemukakan, dengan maksud untuk mengkritik upaya tidak sehat dalam mendapatkan tunjangan sertifikasi profesi. Maka, dengan PLPG, tunjangan profesi yang didapat itu, nyata-nyatalah adalah imbalan negara terhadap guru yang sudah menjalani pendidikan. Sementara sebagian diantara mereka yang tidak PLPG, atau lulus dengan portofolio ada yang menggunakan cara tidak sehat untuk mendapatkan tunjangannya. Karena alasan itulah, maka PLPG bagiku saat itu dan

juga saat ini, adalah upaya legal dalam menghalalkan tunjangan profesi.

Dari obrolah itu pula, saya mendapatkan kesan, bahwa dibutuhkan kesadaran yang tepat dalam mengartikan tunjangan, atau lebih luas lagi, mengartikan rejeki. Pertama, rejeki itu memang ada yang bersumber dari *pimpinan urang*, itulah yang disebut gaji atau tunjangan, atau insentif, atau honor. Kedua, ada rejeki yang muncul dari *papada urang*, artinya kita memiliki peluang untuk mendapatkan rejeki dengan cara shilaturahmi atau bisnis. Bisnis adalah upaya memanfaatkan papada urang, untuk meningkatkan kesejahteraan diri. Ketiga, ada rejeki dari hasil *tina bincurang*. Dalam bahasa Sunda, bincurang itu artinya mata kaki. Dengan kata lain, rejeki itu didapat dari hasil usaha sendiri. Kerja sendiri.

Selain tiga hal tadi (*pimpinan urang*, *papada urang*, *laku bincurang*), kita pun harus meyakini mengenai adanya rejeki *nu teu ondag*. Dalam bahasa lain, rejeki seperti ini tidak disangka-sangka, tidak kita rencanakan, tetapi datang tanpa undangan. Dalam istilah agama, itulah yang disebut rejeki *min haitsuma la yahtasib*, rejeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Seperti hadiah atau berkah dari sebuah kegiatan.

Pengalaman yang tidak bisa dilupakan, adalah model pembelajaran yang dikembangkan dalam diklat ini. Workshop, itulah nama bentuk kegiatannya. Orientasi workshop ini adalah karya. Karya peserta diklat merupakan portopolio yang akan dijadikan indikator kinerja.

Karena semuanya berbasis portopolio, maka kerja nyata dari setiap peserta menjadi penting. Bimbingan dari Dr. Epon Ningrum, Dr. Ahmad Yani, Asep Mulyadi, MPd., dan Lili Sumantri, M.Si terasa benar dalam kegiatan ini. Setiap peserta dibimbing, dari langkah ke langkah, baik itu membuat Silabus, Bahan Ajar, RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran), termasuk merumuskan proposal PTK (Penelitian Tindakan Kelas).

Bagi guru yang terbiasa dengan perangkat pembelajaran ini, tidak akan mengalami kesulitan menghadapi masalah dimaksud. Bu Neng Sri dari Bekasi, Pak Nasyrul Fu'ad dari Garut, dan bu Ayu Sri Puspita dari Ciamis, tampak asyik dengan pekerjaannya itu.

Beberapa orang yang tidak terbiasa, tanpa harus menyebut namanya, keringat dingin dan panas terus bercucuran. Malahan, menurut seorang guru laki yang kebetulan tadi malamnya menonton pertandingan tinju antara Cris John melawan Chonlatarn Piriypinyo dari Thailan, yang juga

memiliki rekor tak terkalahkan dengan 44 kemenangan. Walaupun Chris John mendapatkan kemenangan, namun perlawanan sengit telah dilakukannya. Jual beli pukulan sering dilakukan. Kata seorang guru laki itu, membuat perangkat pembelajaran saat PLPG ini, mirip perlawanan Chris John dimaksud. Walaupun selesai dituntaskan, namun babak belur dirasakan oleh dirinya. Ha..ha..ha..

Sayangnya, atau mungkin, itulah model yang baru bisa dilakukan oleh panitia PLPG. Bagi peserta sendiri, saya sendiri memandang demikian adanya, PLPG kali ini, tidak ada praktik penguatan konten. Padahal, materi ajar geografi itu, erat kaitannya dengan praktek. Beberapa diantara peserta berharap, bila model PLPG ini masih ada, disisipkan satu hari untuk praktek lapangan, atau observasi lapangan. Model pembelajaran ini, selain akan menggairahkan nalar guru, juga memberikan pengalaman studi lapangan bagi guru geografi, apalagi bagi mereka yang berlatar belakang pendidikan non geografi.

Rezeki Hidup

Di tengah obrolah itu pula, Pak Ahmad dari Khusnul memberikan komentar mengenai pentingnya sikap hemat terhadap rejeki yang didapat. Dalam pandangannya, banyak diantara guru yang menjadi orang yang ‘berlaga OKB” (orang kaya baru). Karena tunjangan sertifikasi guru cair, kemudian dia membeli banyak hal,

termasuk kendaraan, yang belum tentu menjadi kebutuhan primer baginya.

Dia sendiri tidak melarang kita membeli kendaraan roda empat. Saya pun mengajukan pandangan serupa itu. Tetapi, yang dia tuturkan itu, adalah pentingnya sikap hemat dalam mengelola keuangan.

Untuk kasus yang satu ini, saya jadi teringat tulisan sendiri, mengenai 'kaya itu adalah selisih'.⁶

Kekayaan adalah salah satu amanah. Amanah dari Tuhan untuk hidup dan kehidupan kita. Kekayaan itu, bukan saja memiliki peran penting dalam hidup manusia, tetapi juga memiliki magnet yang luar biasa besar. Karena daya tarik yang ada dalam kekayaan itulah, kemudian banyak orang, atau malahan hampir mendekati seluruh manusia, akan tertarik dan mengharapkannya.

Menjadi orang kaya, itulah impian banyak orang. memiliki gaji besar. Itulah dambaan manusia. Menduduki jabatan "basah" itulah kemauan banyak orang. Semua itu, adalah berbagai impian yang didorong oleh hasrat untuk menjadi orang kaya.

Tetapi, bila direnungkan dengan sebaik-baiknya. Apakah, yang dimaksud menjadi kaya itu karena kita memiliki gaji yang besar ? jawabannya sudah tentu, gaji yang besar itu perlu. Tetapi, gaji atau honor yang besar, bukanlah ciri atau indikasi dari kekayaan. Kita tidak akan menjadi orang kaya, bila kita

⁶ Lihat <http://momonsudarma.blogdetik.com/?s=selisih>

hanya mengacukan diri pada keinginan untuk memiliki gaji yang besar.

Gaji yang besar tetap tidak akan mencukupi kebutuhan kita, dan kita tidak akan dikatakan menjadi orang, bila kebutuhan hidup atau pengeluarannya pun besar. Gaji yang besar itu, hanyalah akan menjadi penyebab hidup kita boros, dan tetap berada pada kondisi yang serba kekurangan dan tidak punya apa-apa.

Dengan kata lain, orang kaya itu bukan karena dia memiliki gaji atau tunjangan yang besar. Orang kaya itu adalah orang yang mampu meningkatkan selisih besar. Semakin besar selisih ekonomi yang dimilikinya, maka dia berpeluang besar menjadi orang kaya. Orang yang mampu meningkatkan selisih besar itu, adalah orang yang mampu mengelola pengeluaran sehemat mungkin, tetapi pendapatannya setinggi mungkin. Itulah orang yang berpeluang menjadi orang kaya.

Banyak orang disekitar kita yang memiliki gaji besar. Tetapi kehidupannya tidak menunjukkan diri sebagai orang kaya. Hal itu, terjadi, karena gaji yang besar itu, habis ludes digunakan untuk menutupi berbagai pengeluaran hidupnya. Akibat dari kondisi itu, di rumahnya sendiri dia tidak memiliki investasi atau tabungan sedikitpun, bahkan yang ada adalah tunggakan dan piutang ke sana ke mari.

Dalam kaitan ini pun, kita dapat mengatakan dengan tegas, bahwa yang dimaksud miskin itu bukan berarti karena dia memiliki kekayaan yang terbatas. Justru sebaliknya, orang

miskin itu adalah orang yang kaya akan kebutuhan, hasrat dan keinginan. Orang miskin itu, hidupnya selalu dikelilingi oleh kebutuhan, hasrat dan keinginan yang tidak terkuasainya. Orang miskin itu, justru adalah orang yang memiliki kebutuhan lebih besar dari pendapatannya. Orang miskin itu adalah orang yang banyak kebutuhan, dan kebutuhannya hanya bisa dipenuhi oleh peran orang lain. Orang miskin itu adalah orang yang sangat bergantung pada peran orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kendati memiliki jabatan tinggi, tunjangan besar dan gaji tinggi, tetapi bila kebutuhan hidupnya harus tetap mengandalkan bantuan dari koperasi atau dengan cara ‘korupsi’, maka sesungguhnya orang seperti itulah, yang disebut sebagai orang miskin. Orang miskin itu adalah orang yang masih menjadi pengemis dalam hidupnya. Mengemis pada orang lain, dan mengemis pada negara. Bila tidak mendapatkan sesuatu dari hasil mengemisnya, kemudian dia melakukan tindakan pencurian. Sikap mencuri yang halus, biasanya disebut korupsi.

Kembali pada persoalan kita saat ini. Kita ingin menegaskan bahwa menjadi orang kaya itu, adalah pintar dalam meningkatkan selisih antara pendapatan dengan pengeluaran. Orang yang pintar mencari tambahan pendapatan, dan mengelola pengeluaran sehemat mungkin, maka itulah ciri dari orang pintar yang akan menjadi orang kaya. Karena dengan cara seperti itu, dia akan mampu meningkatkan selisih besar dalam kekayaannya.

Dengan semakin besarnya selisih, semakin besar pula investasi atau tabungannya. Semakin tinggi investasinya, maka semakin besar kemandirian ekonominya, dan semakin tinggi pula kemandirian hidupnya, dan dia tidak akan banyak bergantung pada pemberian orang lain, dan tidak akan mengemis pada pihak lain. Proses dan perjalanan ini, mengarahkannya akan menjadikan dirinya sebagai orang kaya.

Di tempat kerja, saya terkesan dengan Group Gehu. Diantara kelompok ini, kerap kali tercetus kalimat bahwa mereka itu adalah kelompok *low status but high profit*. Status kami ini rendah, pejabat biasa, dan bahkan honorer, tetapi selisih-pendapatan dan kesejahteraan kami jauh lebih terasa dan ternikmati. Bagi Group Gehu ini, pendapatan yang kecil, ternyata masih tetap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, dan bisa menabung sehingga memperbesar pundi-pundi kekayaannya, dibandingkan dengan sejumlah rekannya sekantor yang memiliki jabatan tinggi, dan bergaji besar, tetapi tampak gelisah dan merasa serba kekurangan. Kelompok yang kedua itu, disebutnya sebagai kelompok “*high status but low profit*”, status tinggi tetapi selisih-keuntungannya sangat kecil, hal itu terjadi karena gaya hidupnya yang boros.

Pada bagian inilah, kita ingin menegaskan bahwa kesejahteraan dan kekayaan itu, lebih disebabkan oleh kecerdasan kita dalam mengelola pendapatan dan menata pengeluaran, dibandingkan dengan persoalan tingginya jabatan dan atau pendapatan. Karena, kedua hal terakhir itu,

bila tidak disertai dengan hidup hemat, maka akan tetap memosisikan kita sebagai orang yang serba kekurangan. Dan itulah yang disebut dengan kemiskinan.

Banyak diantara kita, yang terpesona atau iri terhadap orang-orang yang bisa jalan-jalan ke luar negeri, wisata kuliner ke berbagai cafe dan restoran, dan berlomba membeli barang baru. Orang yang sedang kita perhatikan itu, yaitu mereka yang sedang gila belanja dan gila jalan-jalan, kita posisikan sebagai orang kaya.

Sekali lagi, perlu ditegaskan. Dengan kekayaan, kita berpeluang untuk bisa melakukan banyak hal. Mulai dari pagi hari, siang hari, sore hari hingga malam hari, dengan kekayaan yang dimiliki, kita bisa dapat melakukan hal. Tetapi, yang perlu diingat, kekayaan itu bukanlah pada banyaknya hal yang dapat kita beli, tetapi banyaknya investasi yang dapat kita simpan.

Orang yang memiliki kebutuhan banyak, dan menuntut pengeluaran yang tinggi, pada dasarnya adalah orang yang miskin. Karena sesungguhnya, investasinya sendiri sangatlah sedikit. Dirinya, hanyalah berposisi sebagai perantara dari sebuah aliran dana yang harus didapat oleh orang lain. Orang yang seperti itu, pada dasarnya tidak akan memiliki tabuhan sedikit pun. Karena pendapatan yang tinggi itu, harus memenuhi seluruh kebutuhannya yang melimpah. Dengan demikian, dapat dikatakan kembali bahwa orang miskin itu adalah mereka yang memiliki kebutuhan hidup jauh lebih besar daripada pendapatannya.

Kebutuhan jauh lebih besar dari pendapatannya. Itulah indikasi dari kemiskinan. Karena kondisi seperti itu pula, orang miskin itu tidak memiliki kemampuan untuk berinvestasi. Orang miskin itu, tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan atau menabung. Kegiatan yang dia lakukan sehari-hari, hanyalah menyalurkan pendapatan terhadap seluruh kebutuhannya sehari-hari.

Dengan kemampuannya berinvestasi, maka orang kaya itu dapat dikategorikan pula sebagai orang yang memiliki modal. Modal untuk melakukan berbagai kegiatan lainnya. Ciri orang kaya itu adalah orang yang memiliki modal untuk melakukan rencana baru. Sementara orang miskin, adalah orang yang terpenjara oleh kebutuhan sehari-hari.

Kita dapat dikatakan sebagai orang kaya, bila kita memiliki kemampuan untuk memenuhi rencana kegiatan baru, dari kegiatan rutin. Bila dalam sehari-hari kita terbiasa makan di restoran, kemudian suatu saat berhasrat makan di cafe di luar kota, dan ternyata kita mampu memenuhinya, maka hal itu menggambarkan bahwa kita mampu memenuhi hasrat baru di luar dari kerutinan. Itulah yang disebut dengan orang kaya.

Orang kaya itu adalah orang yang mandiri secara finansial. Dia tidak bergantung pada kebutuhan rutin. Kebutuhan rutin sudah dapat dipenuhi, dan tidak pernah menjadi kendala. Kebutuhan sehari-hari sudah bisa diatasi dengan baik, dan bukan lagi menjadi kendala. Orang kaya ini, sudah mandiri dari sisi keuangan.

Lebih jauh lagi, orang kaya itu pada dasarnya adalah orang yang sudah mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Tenang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bila seseorang masih merasa gelisah dan merasa harus terus memburu berbagai sumber kekayaan, sesungguhnya hal itu menggambarkan (a) dirinya masih butuh kekayaan, dan (b) hidupnya digelisahkan oleh hasrat kekayaan. Kedua ciri itu, adalah ciri dari kemiskinan yang terdapat dalam jiwanya.

Bercermin pada kasus itu, dapat dikatakan bahwa kemiskinan itu adalah kebergantungan, dan ketidaknyamanan dengan kebutuhan hidup. Orang yang gelisah mengenai kebutuhan dan investasi yang dimilikinya, menunjukkan diri sebagai orang yang miskin. Dia gelisah dengan persediaan keuangan yang ada, dia gelisah dengan pendapatan, dia gelisah dengan sumber kekayaan yang ada di sekitarnya, dia gelisah dengan cicila bulanan, dan lain sebagainya. Kegelisahan-kegelisahan itu, adalah bukti nyata akan kemiskinan yang diidapnya.

Dalam pemahaman kita saat ini, kekayaan dan menjadi orang kaya itu, sesungguhnya dapat ditunjukkan dengan adanya ketenangan hidup. Karena kekayaan dan kaya itu adalah modal hidup, tabungan hidup untuk melanjutkan kegiatan di hari-hari selanjutnya.

Kesimpulan dari itu, saya malah mengartikan bahwa kaya itu bukan hemat, dan rejeki yang baik itu bukanlah hasil dari pengehematan. Rejeki yang baik itu adalah rejeki untuk modal hidup, bisa menghidupi, dan bisa

hidup berkembang biak. Bukan rejeki yang tetap, apalagi berkurang. Itulah yang saya sebut rejeki hidup !

Penutup

Dibagian penutup ini, saya ingin menghaturkan terima kasih kepada semua pihak. Wabil khusus, Pa Ade Koswara, dari pihak panitia, yang memberi kesempatan pengalaman berharga bagi saya untuk mengemukakan kesan dan pesan dalam acara penutupan PLPG 2012.

Kemudian, instruktur PLPG dari jurusan Pendidikan Geografi UPI, yang memberikan pencerahan, dan pengayaan materi serta kesadaran akan profesi guru ini. Sejumlah informasi baru, baik terkait dengan materi ajar, pengayaan profesi, dan juga pengembangan diri, terasa sangat bermanfaat.

Kemudian, bagi rekan-rekan seprofesi, penantian menjadi profesor muda dalam pendidikan, semoga berbagai pengalaman yang ada dan lahir dari pengalaman PLPG ini, dapat dijadikan pemicu untuk meningkatkan kemampuan dan pelayanan pendidikan kita di setiap satuan pendidikan itu sendiri.

Akhirnya, kita semua berharap, semoga Allah Swt, memberkahi pikiran, perasaan, pengalaman dan laku

lampah kita sebagai profesor muda di lingkungan pendidikan dasar dan menengah.

Di akhir pertemuan dengan sesama profesor itu, saya mengajak, mari kita mengubah dari *kelelahan* menjadi *kelillahan*. Perasaan lelah menjalani PLPG adalah biasa, dan itu manusia, tetapi untuk meningkatkan nilai profesi kita, diharapkan kita bisa menanamkan niat usaha ini sebagai sesuatu yang *Lillah* (demi Allah Swt). Mari ubah, dari lelah menjadi *Lillah*, Insya Allah *Berkah*.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2012. *Bahan Ajar : Profesionalisme Guru, PTK dan KTI*. PLPG – UPI Bandung.
- Anonim. 2012. *Bahan Ajar : Geografi SMA/SMK*. PLPG – UPI Bandung.
- Momon Sudarma. *Catatan Pribadi PLPG 2012*. PLPG – UPI Bandung.